

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN TERAPAN



MODEL HILIRISASI PROGRAM KERJA KELOMPOK PEREMPUAN MUSLIMAT NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER DI DAERAH

Tahun ke-3 dari rencana 3 tahun

Tim Peneliti

Dr. Soetji Lestari, M.Si.

NIDN : 0023056211

Dr. Sofa Marwah, S.IP. M.Si

NIDN : 0026047504

Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP.MA

NIDN : 0027107902

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2019

RINGKASAN

Pada Tahun Kedua penelitian ini telah menghasikan model penyusunan program kerja Muslimat NU yang berlandaskan pada isu dan kebijakan pembangunan gender di daerah, yang didukung masukan dalam bentuk strategi implementasi model program kerja Muslimat NU berlandaskan isu dan kebijakan pembangunan gender. Peneliti telah melaksanakan praktik untuk menerapkan model program kerja tersebut bersama dengan pengurus cabang dan anak cabang Muslimat NU Banyumas. Pada Tahun Ketiga ini, seiring perkembangan politik yang terjadi, penelitian ini mengkaji keberadaan organisasi perempuan Islam Muslimat NU sebagai kekuatan politik.

Penelitian ini merupakan penelitian aksi yang berperspektif gender, yaitu menggabungkan orientasi gender dalam bentuk penelitian feminis aksi partisipatif (*Feminis Participatory Action Research – FPAR*) (Saptari & Holzner, 1997: 497). Penetapan informan dipilih secara purposive, meliputi Pengurus Cabang dan Anak Cabang Muslimat NU, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kombinasi *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara (*interviewing*), studi dokumen (*reading*), dan observasi (*watching*) (Punch, 2006 : 52). Teknis analisis menggunakan analisis Moser yang membantu peneliti merumuskan dan mengevaluasi program yang lebih peka gender. Aplikasi analisis ini untuk penelitian yang dirancang untuk mengevaluasi suatu program atau proyek (Handayani & Sugiarti, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Muslimat NU sebagai organisasi perempuan Islam yang memiliki jumlah anggota yang sangat banyak, tersebar ke pelosok perdesaan, sesungguhnya juga memiliki potensi sebagai organisasi yang memiliki kekuatan politik. Selain itu, anggota Muslimat NU yang sangat banyak, sedikit banyak juga mendorong potensi mereka sebagai basis pendulang suara dalam pemilu legislatif ataupun pilkada. Sebagai kader, mereka tidak mendapatkan pelatihan khusus dalam pendidikan politik, sesuai *khittah* Muslimat sebagai ormas sosial keagamaan. Namun seiring perjalanan waktu, kebutuhan mereka terhadap wawasan politik menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam praktik politik lokal, kemenangan para kader Muslimat NU dalam beberapa pilkada membuka mata banyak pihak mengenai kekuatan politik mereka. Kader-kader Muslimat NU memiliki potensi sebagai kandidat dalam pemilu legislatif ataupun pemilu kepala daerah. Puncaknya adalah ketika Khofifah sebagai ketua Muslimat NU nasional memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur. Selain itu, di beberapa daerah, ketua Pengurus Cabang Muslimat NU juga memenangkan pemilihan bupati. Hasil wawancara dengan Umi Azizah, Bupati Tegal sekaligus ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Tegal menunjukkan keberhasilannya memenangkan Pilkada Tegal tidak lepas dari dukungan segenap kader Muslimat NU. Pengalamannya dalam mengelola organisasi, sangat bermanfaat baginya dalam memimpin pemerintahan daerah saat ini. Umi Azizah adalah seorang kader yang merintis karir keorganisasiannya dari tingkat desa (anak ranting). Keberadaannya sebagai bupati saat ini juga mendorong kemanfaatan bagi kemajuan Muslimat NU. Sedikit berbeda dengan hal itu,

kemenangan Munjidah Wahab dalam Pilkada Jombang, sudah didahului oleh karir politiknya di DPRD Jombang sejak lama. Nama Wahab dibelakangnya juga sengaja dilekatkan untuk mendorong publisitas dirinya. Munjidah Wahab adalah ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang. Dirinya juga aktif berorganisasi sejak remaja namun pada level cabang (kabupaten). Eksistensinya sangat didukung oleh kekompakan PKB yang notabene sebagai partai yang dibentuk NU, serta didukung juga oleh segenap kader Muslimat NU setempat. Selain itu, cerita kegagalan kader Muslimat dalam laga Pilkada juga terjadi meskipun tidak dalam tahun perhelatan yang sama. Kekalahan Laily Manshur sebagai ketua Cabang Muslimat NU Banyumas tiga periode dalam pencalonan wakil bupati Banyumas memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya pengalaman dan pendidikan politik bagi kader-kader Muslimat. Keikhlasan dalam bekerja dan berbuat untuk sesama tak pelak sering dimanfaatkan dalam kerasnya pertarungan dalam dunia politik. Keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengalaman dan wawasan politik bagi kader-kader Muslimat, meskipun bukan secara keorganisasian Muslimat NU mengambil posisi sebagai organisasi politik.

Kata kunci: Muslimat NU, organisasi Islam, perempuan, kekuatan politik

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB III. METODE PENELITIAN.....	11
BAB IV. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	13
4.1 Tujuan Penelitian	13
4.2 Manfaat Penelitian	13
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	14
5.1 Muslimat NU sebagai Organisasi Sosial Keagamaan Perempuan.....	14
5.2 Potensi Muslimat NU dalam Mendukung Pembangunan Gender di Daerah.....	19
5.3 Menatap Organisasi Muslimat NU sebagai Kekuatan Politik.....	24
5.4 Mengukur Potensi Kader Muslimat NU Kabupaten Banyumas dalam Pemilu Legislatif.....	34
5.5 Luaran yang Dicapai.....	39
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN - LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Contoh Form Isian Penyusunan Program Kerja Muslimat NU.	4
Tabel 2.	Tahapan Penelitian, Tugas Peneliti, dan Indikator Capaian.....	12
Tabel 2.	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dan 2019.....	35

DAFTAR GAMBAR

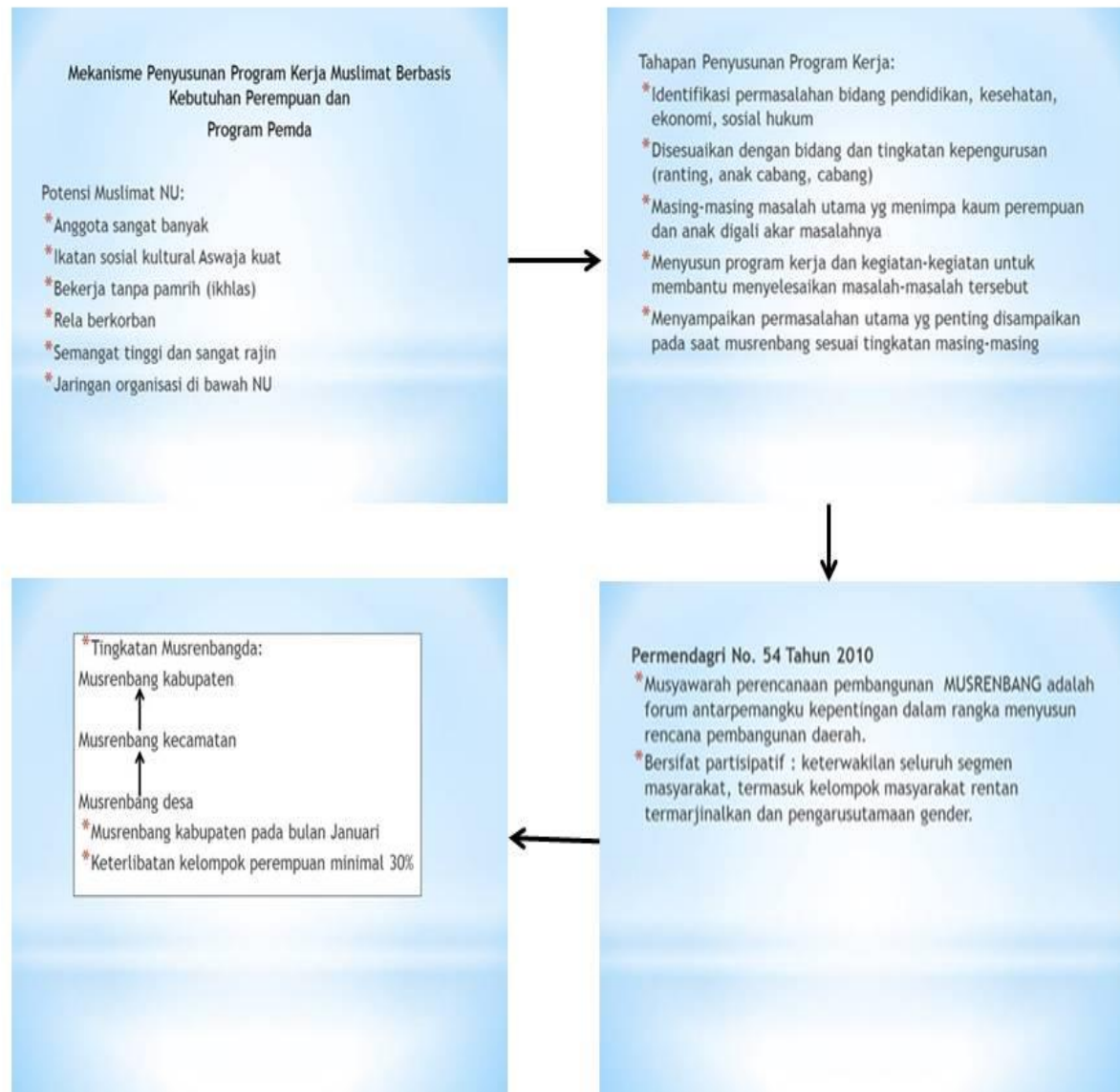
Gambar 1.	Alur Pikir Penyusunan Model Program Kerja Muslimat NU...	2
Gambar 2.	Model Program Kerja Muslimat NU Berbasis Isu dan Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah.....	3
Gambar 3.	Road Map Peneliti.....	10
Gambar 4.	Lambang Organisasi Muslimat NU.....	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada **tahun kedua** sebelumnya, penelitian ini sudah menghasilkan sebuah model mengenai penyusunan program kerja Muslimat NU yang selaras dengan isu dan kebijakan dalam pembangunan gender di daerah. Di tengah potensi sumber daya dan program kerja Muslimat NU, konsistensi dan keikhlasan perempuan Muslimat NU memajukan kaum perempuan dan organisasi dapat disinkronisasikan untuk mendukung capaian pembangunan gender di daerah. Hal tersebut mengingat bahwa sampai saat ini Kabupaten Banyumas masih mengalami masalah ketidaksetaraan gender dalam pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas yang berada di bawah angka IPG dan IDG dan provinsi dan nasional. Pada Tahun 2015, IPG Banyumas di bawah IPG Jawa Tengah, yaitu IPG Banyumas adalah 86,66, IPG Jawa Tengah 92,21 dan IPG Nasional 91,03. Adapun IDG Banyumas adalah 67,77; IDG Jawa Tengah 74,80; dan IDG Nasional 70,83 (KPPPGA, 2016).

Alur pikir dari pentingnya menyusun program kerja Muslimat NU yang memperhatikan isu pembangunan gender di daerah, dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan Model Program Kerja Muslimat NU

Penjabaran model program kerja Muslimat NU terhadap pembangunan gender ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi isu dan permasalahan gender daerah terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial hukum, oleh masing-masing bidang.

2. Identifikasi juga menyesuaikan dengan cakupan kerja dan sumber daya masing-masing tingkatan kepengurusan.
3. Setelah masalah teridentifikasi oleh masing-masing tingkat kepengurusan, maka digali lagi akar masalahnya.
4. Pada saat yang sama, pengurus Muslimat sudah menginventarisir program kebijakan pembangunan gender di tingkat kabupaten, untuk menjadi perbandingan dan rujukan.
5. Pada masing-masing tingkatan kepengurusan dan bidang, mulai menyusun program yang berperspektif gender.
6. Masing-masing pengurus di tingkatan juga menyampaikan permasalahan utama pada saat Musrenbang sesuai tingkatan masing-masing.



Gambar 2. Model Program Kerja Muslimat NU Berbasis Isu dan Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah

Dalam implementasi, penelitian ini juga merumuskan form isian untuk membantu para pengurus Muslimat NU merumuskan program kegiatan yang selaras dengan isu dan permasalahan gender dalam pembangunan daerah. Contoh isian form sebagai berikut :

Tabel 1. Contoh Form Isian Penyusunan Program Kerja Muslimat NU

Form Isian Penyusunan Program Kerja Muslimat-NU Berdasarkan Kebutuhan Perempuan dan Program Pemda							
No	Bidang	Fenomena	Akar Masalah	Program Pengembangan	Kegiatan	Program Pemda	Sinergi Kegiatan Muslimat dengan Program Pemda
1	Pendidikan	Angka partisipasi perempuan tingkat SD/MI lebih rendah daripada laki-laki				• Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal, penguatan lembaga kursus dan kelembagaan, pengembangan pendidikan aksara. • Peningkatan mutu tenaga pendidik PAUD, SD/SLB/MI.	
		Belum 100% perempuan melek huruf					
		Perempuan usia 7-24 tahun lebih banyak yang tidak sekolah lagi daripada laki-laki					
2	Kesehatan	Rasio posyandu dan jumlah balita kurang seimbang				• Program pengawasan obat dan makanan; • Program perbaikan gizi masyarakat; • Program peningkatan kesehatan lansia; • Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
		Angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan dan bayi					
		Peredaran obat terlarang					
3	Ekonomi	Angka partisipasi kerja perempuan cenderung stagnan				• Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. • Program peningkatan kesempatan kerja; • Program penciptaan usaha kecil menengah yang kondusif; • Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; • Program peningkatan kualitas koperasi	
		Masalah pengangguran belum terselesaikan					
4	Sosial Hukum	Kekerasan terhadap perempuan korban KDRT				• Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; • Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;	
		Kekerasan buruh migran					
		Perempuan tuna susila					
		Perempuan korban perdagangan				• Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; • Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;	
		Kekerasan terhadap anak					

Model program kerja Muslimat NU di atas juga dilengkapi dengan strategi implementasi untuk mendorong Muslimat NU di daerah, melalui:

1. Pemahaman kepekaan mengenai perkembangan masalah sosial ekonomi yang ada di sekitar.
2. Memanfaatkan akses para pengurus Muslimat NU terhadap media massa dan internet untuk menangkap isu gender di masyarakat.
3. Keikutsertaan dalam kegiatan SKPD Pemkab agar lebih mendalam memahami program kerja SKPD.
4. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk lebih menguatkan jaringan Muslimat NU dengan SKPD pemerintah daerah.
5. Pengurus cabang dan anak cabang Muslimat NU dapat lebih memahami informasi di website *banyumaskab.go.id*.
6. Menguatkan keikutsertaan pengurus dan anggota Muslimat NU dalam Musrenbang sesuai dengan tingkatan masing-masing.
7. Pendampingan tenaga ahli secara lebih intensif untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan Muslimat NU.
8. Program kegiatan walaupun sudah ada rambu-rambu dari pengurus pusat, secara substansial dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan isu sosial dan ekonomi yang berkembang.
9. Mendorong pengurus anak cabang dan pengurus ranting untuk mengikuti pola kerja yang dilakukan oleh pengurus cabang Muslimat NU kabupaten.
10. Memanfaatkan jaringan-jaringan yang selama ini sudah terbentuk di kalangan Muslimat NU di daerah.

1.2. Permasalahan

Keberadaan Muslimat NU sebagai organisasi perempuan Islam yang memiliki jumlah anggota yang sangat banyak, tersebar ke pelosok perdesaan, sesungguhnya juga memiliki potensi sebagai organisasi yang memiliki kekuatan politik. Walaupun keberadaannya sesuai AD ART adalah ormas sosial keagamaan, tetapi kader-kader Muslimat NU memiliki potensi sebagai kandidat dalam pemilu legislatif ataupun pemilu kepala daerah. Selain itu, anggota Muslimat NU yang sangat banyak, sedikit banyak juga mendorong potensi mereka sebagai basis pendulang suara dalam pemilu legislatif ataupun pilkada. Oleh karena itu, tahap penelitian ketiga ini diarahkan untuk mengkaji keberadaan organisasi perempuan Islam Muslimat NU sebagai kekuatan politik.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Eksistensi Muslimat NU sebagai kelompok perjuangan perempuan secara teoritis merujuk pada karakter civil society. Civil society adalah ruang terpisah bagi organisasi, menjadi bentuk komunikasi dan wacana yang reflektif, penguasaan individu atau kelompok yang bertindak secara kolektif serta menyebarkan alat sipil untuk mempengaruhi negara serta kebijakannya, tetapi tidak untuk mengambil kekuasaan negara, dan tidak dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan (Alagappa, 2004 : 9). Tradisi Tocqueville menjelaskan bahwa *civil society* bekerja dalam kondisi kesetaraan sosial ekonomi dan kebebasan politik, didasarkan pada pembatasan negara terhadap ruang publik, jaminan kerangka kerja yang legal serta kondisi yang lain (seperti kesetaraan sosial ekonomi) yang diperlukan untuk fungsi efektif dari *civil society*. Adapun konsepsi Gramsci tentang *civil society* meliputi semua institusi sosial relasi non-produksi, non-pemerintahan, non kekeluargaan, melibatkan mulai dari kelompok bersantai sampai kelompok dagang, gereja dan partai politik. Selain karena secara kuantitas banyak, Muslimat NU juga bergerak pada berbagai level, dari tingkat pusat sampai daerah, dengan membawa isu-isu pemajuan perempuan di berbagai bidang. Mereka bergerak bukan untuk menguasai negara, tetapi demi kemajuan kelompok perempuan.

Namun demikian, nilai patriarkhi menjadi penyebab sebab "sulitnya" peletakkan kelompok perempuan sebagai kekuatan civil society. Subordinasi akibat patriarkhi terhadap perempuan menjadi penghalang bagi lahirnya kelompok perempuan sebagai kekuatan *civil society*. Patriarkhi telah tumbuh dan berkembang menjadi cara pandang utama untuk menjelaskan ketertinggalan perempuan di berbagai sudut dunia (Phlicher & Whelehan, 2004). Patriarkhi menjadi nilai yang universal, dan sukses menempati posisi utama untuk melihat

penderitaan perempuan oleh laki-laki. Dari ruang yang paling privat, patriarkhi telah masuk pada lingkup masyarakat sampai tingkat negara. Nilai patriarkhi secara umum telah berlaku atau beroperasi pada hampir semua institusi sosial, ekonomi, hukum, politik maupun budaya.

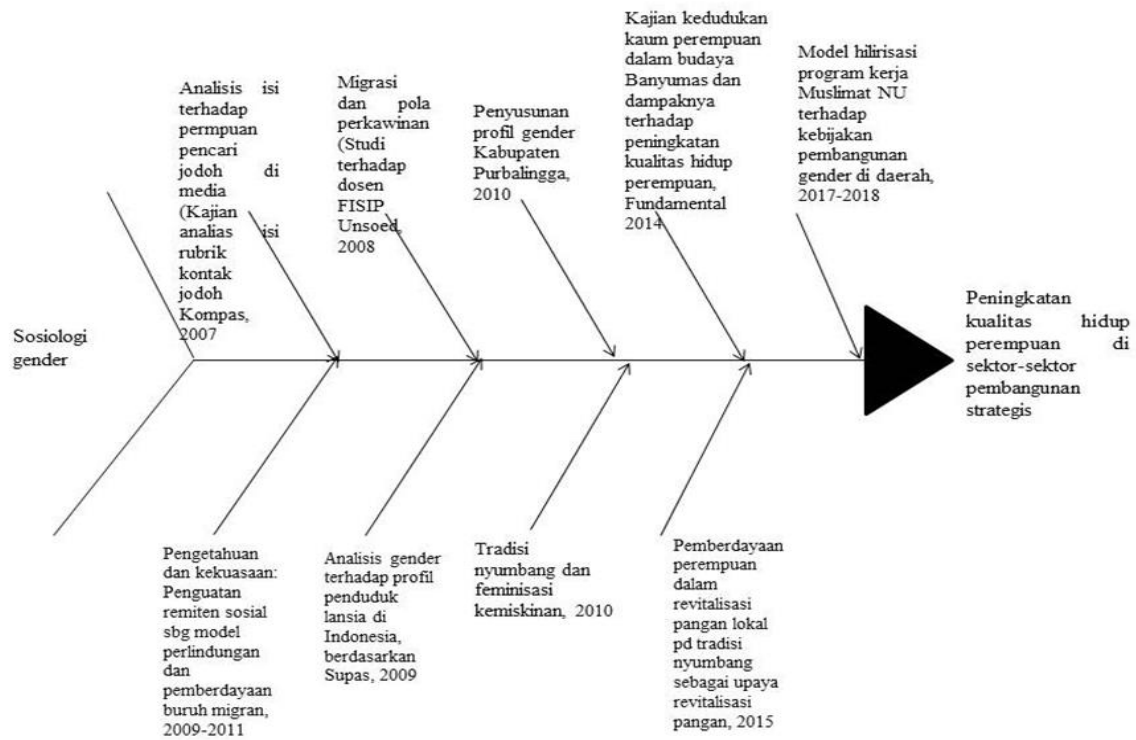
Betapapun nilai patriarkhi beroperasi pada hampir semua institusi, namun banyak momen yang telah menunjukkan keberadaan kelompok perempuan sebagai elemen civil society, mampu bertindak tidak dengan hasrat politik maupun ekonomi, tetapi untuk keadilan dan kesetaraan dalam kerangka demokratisasi. Merekalah bagian dari kekuatan perempuan yang berupaya untuk berstrategi dan bertindak mencapai keadilan, kebenaran, kebaikan baik semua kelompok, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Penting untuk dipahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat (laki-laki dan perempuan) adil dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, pembangunan belum memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang semula dianggap “netral” dan akan memberi efek manfaat yang sama kepada semua warga, ternyata memberi program kerja terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Dengan demikian, sangat penting untuk menjadikan tujuan pembangunan agar dirasakan secara nyata oleh laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender menjadi strategi utama untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Melalui pengarusutamaan gender dapat dikembangkan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mendorong perempuan sebagaimana halnya

laki-laki dalam hal perhatian dan pengalaman, pada dimensi yang terintegrasi mulai dari desain, implementasi, sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pada semua aspek politik, ekonomi, dan sosial, agar kesetaraan dan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dapat dicapai (Rai, 2002:173). Dengan mengarusutamakan gender ke dalam berbagai lini pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan akan berjalan efisien, berkelanjutan, dan adil. Lini pembangunan yang dimaksudkan mencakup sektor-sektor strategis pembangunan yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, hukum, dan sosial budaya.

Pengarusutamaan gender mulai diterapkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Beberapa prinsip penting dalam pengarusutamaan gender menurut pengertian definisi dari PBB, ILO, UNDP, yaitu : 1) Pengarusutamaan gender untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender; 2) Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan lintas sektoral dan di semua tingkatan, baik nasional maupun daerah; 3) Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam agenda pembangunan; 4) Mengadopsi perspektif gender ke dalam setiap tahapan siklus perencanaan; 5) Mentransformasikan keseluruhan proses dan kerangka perencanaan pembangunan menjadi sensitif gender; 6) Selalu memperhitungkan dampak dari peran gender dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan, khususnya dampak negatif terhadap perempuan; 7) Menciptakan suasana kondusif agar *gender mainstreaming* lebih mudah diterima.



Gambar 3. Road Map Peneliti

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan merujuk penjelasan Strauss dan Corbin, yaitu mengenai keyakinan peneliti berdasarkan pada pengalaman penelitian dan sifat dari permasalahan. Banyak wilayah studi yang secara alamiah mengarahkan peneliti lebih pada penelitian kualitatif (Strauss & Corbin, 1990: 19). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian aksi yang berperspektif gender, yaitu menggabungkan orientasi gender dalam bentuk penelitian feminis aksi partisipatif (*Feminis Participatory Action Research – FPAR*). Dalam *FPAR* peneliti mengamati suatu proses sosial atau aksi yang sedang berlangsung dan menuliskannya, dan selanjutnya mendesain suatu bentuk intervensi (Saptari & Holzner, 1997 : 497).

Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu bersifat sementara, mengoptimalkan keragaman, memungkinkan perubahan sesuai dengan informasi dan pemahaman di lapangan, dan jumlahnya sesuai prinsip kejenuhan informasi (Harrison, 2007 : 26). Dalam hal ini informan penelitian adalah perempuan pengurus Muslimat NU, baik di tingkat kepengurusan cabang maupun anak cabang, yaitu dari Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, dan Pengurus Cabang Muslimat NU Sokaraja, yang dipilih secara *purposive*, serta pihak beberapa SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsonakertrans, Disperindagkop, dan sebagainya sebagai narasumber.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kombinasi *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara (*interviewing*), studi dokumen (*reading*), dan observasi (*watching*) (Punch, 2006 : 52). Penelitian ini menggunakan teknik analisis Moser, adalah suatu teknis yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan kebijakan program yang lebih peka gender, dengan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kebutuhan praktis dan strategis gender). Aplikasi analisis ini adalah untuk penelitian yang

dirancang untuk mengevaluasi suatu program/proyek. Analisis gender dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perlu dikaji untuk tujuan memberdayakan perempuan (Handayani & Sugiarti, 2002 : 180).

Tabel 2. Tahapan Penelitian, Tugas Peneliti, dan Indikator Capaian

Tahun 3	Tahapan Penelitian	Peran Peneliti	Peran Mitra	Indikator capaian
Tahun ke-3	Menyampaikan laporan penelitian tahun ke-2 kepada mitra	Menyampaikan laporan	Berdiskusi dan menerima laporan	• Buku monograf mengenai gerakan perempuan dalam ormas keagamaan. • Buku saku pedoman penyusunan program kerja Muslimat NU • Publikasi dalam jurnal internasional direncanakan terindeks
	Berkonsultasi dengan mitra mengenai perkembangan terakhir untuk penyusunan buku monograf	Konsultasi	Berdiskusi	
	Menyusun rancangan buku monograf dan membagi tugas tim	Menyusun rancangan	-	
	Menyusun laporan Tahun ke-3	Menyusun laporan	-	
	Menyusun buku monograf	Menyusun rancangan	-	
	Menyampaikan laporan Tahun ke-3 kepada mitra	Penyampaian hasil	Menerima laporan	
	Menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional	Menyusun artikel	-	

BAB IV.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

4.1. Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan Laporan penelitian berupa pengembangan seluruh hasil penelitian dalam kerangka studi gerakan perempuan Islam di tingkat lokal, yaitu mengkaji organisasi perempuan Islam sebagai kekuatan politik.
2. Melakukan publikasi dalam jurnal internasional direncanakan jurnal internasional terindeks Asian Journal of Women Studies , Ewha University, South Korea
3. Menyusun Buku Monograf berdasarkan seluruh hasil penelitian berjudul *Kekuatan Politik Ormas Perempuan Islam*
4. Mengajukan Hak Cipta mengenai *Pengintegrasian Program Muslimat Dalam Perencanaan Program Pembangunan Di Daerah*

4.2. Manfaat Penelitian

Seluruh hasil penelitian ini bermanfaat menyediakan data dan informasi terkait potensi Muslimat NU di level daerah, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyediakan informasi terkait model integrasi penyusunan program kerja Muslimat NU yang selaras dengan isu pembangunan gender di daerah. Keanggotaan Muslimat NU yang sangat banyak dan tersebar hingga ke pelosok sangat berpotensi mendukung keberhasilan pembangunan gender di daerah. Selain itu dalam konteks politik, mereka juga berpotensi sebagai basis pendulang suara. Kader-kader yang mereka miliki juga berpotensi untuk menjadi kandidat yang berkualitas dalam ajang pemilu legislatif ataupun pilkada. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat menyediakan informasi terkait keberadaan Muslimat NU sebagai organisasi sosial keagamaan Islam yang memiliki kekuatan politik.

BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Muslimat NU sebagai Organisasi Sosial Keagamaan Perempuan

Muslimat NU merupakan salah satu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yaitu sebagai badan otonom. Muslimat NU beranggotakan perempuan muslimah yang memiliki paham *ahlusunnah wal jamaah*. Dalam hal ini, keberadaan Muslimat NU mengikuti perjuangan NU yang memegang paham *ahlusunnah wal jamaah* dan mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab. Keanggotaan Muslimat NU adalah perempuan warga negara Indonesia yang beragama Islam, paling rendah berusia 20 tahun ke atas atau sudah menikah.

Tumbuhnya ide gagasan untuk mendirikan Muslimat NU sebagai organisasi perempuan muslimah Nahdlatul Ulama berlangsung di tengah perkembangan pergerakan di Indonesia. Dalam hal ini, proses pendirian Muslimat NU tidak serta merta langsung selesai pada satu kali muktamar. Namun diperlukan waktu pembahasan yang lama dari penyelenggaraan satu muktamar ke muktamar berikutnya. Pada tahun 1926, ketika Muktamar NU diselenggarakan di Surabaya, perempuan-perempuan muslimah mulai merintis berdirinya Muslimat, di tengah-tengah kegiatan muktamar.

Selanjutnya pada penyelenggaraan Muktamar NU di Menes Pandeglang tahun 1938, inisiasi perempuan nahdliyin untuk mendirikan organisasi perempuan disepakati oleh para ulama NU. Ketika itu, keberadaan organisasi perempuan yang disebut Muslimat NU disepakati sebagai anggota organisasi NU, bukan sebagai pengurus. Pada kesempatan tersebut, tokoh-tokoh perempuan muslimah antara lain Ny R Djuaesih dan Ny Siti Sarah. Ketika Muktamar NU ke-14 tahun 1939 dilaksanakan di Magelang, beberapa wakil dari kelompok dari berbagai daerah seperti Muntilan, Sokaraja, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, dan Purworejo ikut

menghadiri muktamar tersebut dan melakukan rapat persiapan pendirian organisasi Muslimat NU. Masing-masing perwakilan menyampaikan pandangannya pentingnya mengenai kontribusi kaum perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa perwakilan perempuan muslimah memimpin sidang yang dilaksanakan pada muktamar tersebut. Mereka mendiskusikan tentang pentingnya peranan perempuan dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan dan dakwah. Persidangan untuk Muslimat tersebut dipimpin oleh Siti Juaesih dari Bandung (<http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu> diakses 1 Juni 2019).

Persiapan pendirian Muslimat semakin matang pada saat pelaksanaan Mukhtamar NU ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Dalam muktamar tersebut, juga dilaksanakan rapat-rapat oleh ibu-ibu muslimah yang beberapa pandangan umum seperti; 1) Persetujuan keberadaan Muslimat oleh muktamar; 2) Anggaran Dasar Muslimat; 3) Susunan kepengurusan; 4) Kurikulum untuk pendidikan madrasah putri; 5) Rencana penerbitan majalah bulanan. Resolusi tersebut kemudian disampaikan langsung dalam kongres dan disetujui oleh *Hoof Comitee Congress* NU ketika itu. Ketua pengurus Muslimat ketika itu adalah Ny. Hindun dari Surabaya.

Selama penjajahan Jepang berlangsung, kegiatan keorganisasian NU maupun aktivitas perempuan muslimah nyaris lumpuh. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, kegiatan organisasi NU dan perempuan muslimah mulai menggeliat lagi. Pada saat Mukhtamar NU tahun 1946 diselenggarakan di Purwokerto, Muslimat menjadi bagian resmi NU yang memiliki struktur kepengurusan sendiri. Tanggal 29 Maret 1946 atau 26 Rabiul Akhir 1465 tercatat sebagai hari kelahiran resmi Muslimat NU. Sebagai bagian resmi dari NU, Muslimat menangani berbagai masalah perempuan dalam kemasyarakatan (PP Muslimat NU, 1979). Ketika itu ketua pengurus Muslimat adalah Ny. Chadijah Dahlan. Kepengurusan resmi Muslimat NU pada saat pendirian

resmi di Purwokerto adalah sebagai berikut: Ny Fatmah Surabaya (sebagai penasehat); Ny Chadijah Pasuruan (sebagai ketua); Ny Mudrikah (penulis); Ny Muhajja (sebagai penulis II); Ny Kasminten Pasuruan (bendahara); Ny Fatehah (sebagai pembantu); Ny Musyarrafah Surabaya (sebagai pembantu); Ny Alfijah (sebagai pembantu)(<http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu> diakses 1 Juni 2019).

Pada saat Mukhtamar NU ke-17 di Madiun tahun 1948, dibentuk beberapa komisariat kepengurusan Muslimat di berbagai daerah. Komisariat yang terbentuk adalah Madiun, Surabaya, Banyumas (Sokaraja), Kedu, Cirebon, Priangan (Tasikmalaya), Jember (Besuki), Malang, dan Tapanuli. Dalam hal Komisariat Banyumas diketuai oleh Ny. Sulimah dari Sokaraja. Pada era setelah itu, kegiatan Muslimat lebih banyak berhubungan dengan suasana perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan RI. Dalam hal ini para perempuan ikut berjuang baik secara langsung, seperti turut bergabung menjadi kesatuan pejuang melalui pasukan Hizbullah, Sabilillah, barisan Mujahidin dan sebagainya, atau secara tidak langsung seperti melayani dalam dapur umum, kesehatan, penyediaan pakaian, dan sebagainya. Baru setelah tahun 1954, Muslimat melaksanakan kongres secara otonom pada saat Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya. Adapun Ketua Umum PP Muslimat NU dari masa ke masa yaitu sebagai berikut (<http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu> diakses tanggal 1 Juni 2019):

1	Ny Chodijah Dahlan	1946-1947
2	Ny Yasin	1947-1950
3	Ny Hj Mahmudah Mawardi	1950-1979
4	Hj Asmah Syahrini	1979-1995
5	Hj Aisyah Hamid Baidlawi	1995-2000
6	Hj Khofifah Indar Parawansa	2000-sekarang

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki visi misi Muslimat NU dijalankan secara nasional dari atas sampai ke bawah. Visi dan misi Muslimat NU adalah sebagai berikut: **Visi** : Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah SWT. **Misi** : Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terdiri dari : 1) Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah SWT; 2) Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat; 3) Melaksanakan tujuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhai Allah SWT. Muslimat NU memiliki lambang organisasi sebagai berikut:



Gambar 4. Lambang Organisasi Muslimat NU

Lambang Muslimat memiliki makna sebagai berikut : 1) Bola dunia terletak di tengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdikan dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat; 2) Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia,

untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan takwa kepada Allah SWT; 3) Lima buah bintang terletak di atas, yang terbesar dipuncak berarti: Sunnah Rasulullah Saw yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah'anhum; 4) Arti seluruh bintang yang berjumlah sembilan buah yaitu: Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali Songo, yakni dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan. Adapun warna-warna yang digunakan dalam lambang Muslimat NU di atas, memiliki makna sebagai berikut: 1) Putih melambangkan ketulusan dan keihlasan; 2) Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian; 3) Tulisan Nahdlatul Ulama berarti Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.

Selanjutnya dijelaskan mengenai perangkat organisasi Muslimat NU, yaitu terdiri dari lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Lembaga yang berbadan hukum, yaitu: 1) Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKMNU); 2) Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) Bina Bakti Wanita; 3) Yayasan Haji Muslimat NU (YHMNU); 4) Induk Koperasi An-Nisa' (INKOPAN). Adapun lembaga yang tidak berbadan hukum terdiri dari: 1) Himpunan Da'iyah dan Majelis Ta'lim Muslimat NU (Hidmat NU); 2) Ikatan Haji Muslimat NU (IHMNU); 3) Ikatan Guru TK Muslimat NU (IGTKMNU); 4) Ikatan Guru RA Muslimat NU (IGRAMNU); 5) Ikatan Pengelola TK Muslimat NU (IPTKMNU); 6) Ikatan Pengelola RA Muslimat NU (IPRAMNU); 7) Ikatan Guru Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU; 8) Ikatan Pengelola Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU.

Organisasi Muslimat NU memiliki jenjang kepemimpinan organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat anak ranting. Jenjang kepemimpinan organisasi digambarkan sebagai berikut: 1) Pimpinan Pusat (PP) untuk Tingkat Pusat; 2) Pimpinan Wilayah (PW) untuk Tingkat Provinsi;

3) Pimpinan Koordinator Daerah (P-Korda) untuk Tingkat eks Karesidenan; 4) Pimpinan Cabang (PC) untuk Tingkat Kabupaten/Kota; 4) Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) untuk Cabang di Luar Negeri; 5) Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk Tingkat Kecamatan; 6) Pimpinan Ranting (PR) untuk Tingkat Kelurahan/Desa; 7) Pimpinan Anak Ranting (PAR) untuk Tingkat Dusun/RW.

5.2. Potensi Muslimat NU dalam Mendukung Pembangunan Gender di Daerah

Pada hakikatnya pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat (laki-laki dan perempuan) adil dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, pembangunan belum memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang semula dianggap “netral” dan akan memberi efek manfaat yang sama kepada semua warga, ternyata memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi utama untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mendorong perempuan sebagaimana halnya laki-laki dalam hal perhatian dan pengalaman, pada dimensi yang terintegrasi mulai dari desain, implementasi, sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pada semua aspek politik, ekonomi, dan sosial, agar kesetaraan dan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dapat dicapai (Shirin M Rai, 2002).

Pengarusutamaan gender mulai diterapkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Beberapa prinsip penting dalam pengarusutamaan gender menurut pengertian definisi dari PBB, ILO, UNDP, yaitu : 1) Pengarusutamaan gender untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender; 2) Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, proyek, dan kegiatan

pembangunan lintas sektoral dan di semua tingkatan, baik nasional maupun daerah; 3) Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam agenda pembangunan; 4) Mengadopsi perspektif gender ke dalam setiap tahapan siklus perencanaan; 5) Mentransformasikan keseluruhan proses dan kerangka perencanaan pembangunan menjadi sensitif gender; 6) Selalu memperhitungkan dampak dari peran gender dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan, khususnya dampak negatif terhadap perempuan; 7) Menciptakan suasana kondusif agar *gender mainstreaming* lebih mudah diterima.

Sejauh ini capaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan selama sembilan tahun terakhir. Namun demikian masih terdapat kesenjangan antara kapabilitas perempuan dibanding laki-laki, yang ditunjukkan dengan selisih GDI dan HDI. Pada tahun 2012, HDI mencapai 73,29 tetapi GDI-nya 68,52. HDI atau *Human Development Index* adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan GDI adalah indeks pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian perempuan dan laki-laki (KPPA & BPS, 2013). Persoalan disparitas capaian HDI dan GDI tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga terjadi di level daerah. Di Kabupaten Banyumas misalnya, pada tahun 2012 capaian HDI 73,33, namun indeks GDI adalah 65,02. Sebagai perbandingan, di level Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2012 capaian HDI adalah 73,36 dan capaian GDI adalah 66,8.

Berkaitan dengan masalah gender dalam pembangunan tersebut, kelompok perempuan memegang peranan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berperspektif gender. Misalnya, kelahiran UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu maupun UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang mengatur ketentuan kuota 30 % perempuan di parlemen, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan sebagainya. Kelahiran

berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil dari perjuangan kelompok perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Indonesia (KPI), dan sebagainya.

Di samping keberadaan organisasi perempuan yang telah disebutkan di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muslimat NU merupakan organisasi massa perempuan non-pemerintah yang memiliki potensi sangat strategis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan berperspektif gender melalui program kerja yang dilakukan. Muslimat NU adalah organisasi *under bow* atau perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai badan otonom yang beranggotakan perempuan Muslimah berumur 40 tahun ke atas berpaham *ahlu sunnah wal jamaah*. Kepengurusan Muslimat NU terhierarkhi dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, anak cabang, dan ranting. Jenjang kepengurusan tersebut di seluruh Indonesia dan juga sudah ada sebagian di luar negeri, seperti di Jeddah, Arab Saudi, Malaysia, dan Hongkong.

Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, eksistensi kegiatan perempuan Muslimat NU sudah dikenal sangat luas. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarkhi dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat mengakar dan mendalam sehingga mendukung posisi strategis Muslimat NU. Jaringan kultural terutama mengandalkan basis tradisional, seperti pondok pesantren, kelompok pengajian, kyai da para guru ngaji. Dukungan keanggotaan yang sangat banyak dan mendalam, menunjukkan potensi peran strategis anggota Muslimat NU untuk mendukung implementasi kebijakan berperspektif gender sekaligus menjadi *gender vocal point* di masyarakat.

Muslimat NU memiliki dua macam keanggotaan, yaitu pertama anggota *jam'iyah* seperti halnya organisasi NU dan yang kedua adalah anggota *jama'ah*. Pengertian anggota *jam'iah* adalah anggota yang mengikuti struktur Muslimat, mengikuti aturan-aturan Muslimat, misalnya mempunyai kartu tanda anggota, kemudian aktif mengikuti pengajian-pengajian, dan mungkin mempunyai pakaian-pakaian resmi Muslimat, mengikuti aturan Muslimat, dan segala sesuatu lainnya. Anggota yang demikian termasuk anggota Muslimat secara *jam'iah*. Adapun anggota *jama'ah* adalah anggota simpatisan *nahdliyin* atau NU dalam makna keorganisasiannya. Anggota yang termasuk dalam *jama'ah* adalah perempuan atau ibu-ibu mereka yang dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah mengikuti Islam *aswaja* NU, maka mereka termasuk anggota Muslimat secara *jama'ah*.

Berkaitan dengan hal tersebut, ikatan sosial-kultural sebagai anggota Muslimat lebih menguat justru tanpa perlu label keanggotaan formal dengan bukti kepemilikan kartu anggota Muslimat (Kartamus). Bagi para pendukung Muslimat NU, ikatan sosial-kultural terhadap Muslimat NU jauh lebih penting dibanding memiliki kartu anggota sebagai bentuk ketertiban administrasi. Dalam hal pendanaan, organisasi Muslimat NU adalah organisasi yang mandiri, dengan menggali sumber dana yang bersumber dari iuran anggota dengan istilah lokal *kalengan* atau *pithian*. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi Muslimat NU untuk mendukung pembangunan gender, yaitu :

1. Anggota Muslimat NU sangat patuh mengikuti visi misi Muslimat NU Pusat sehingga dalam menjalankan program kegiatan organisasi dapat senantiasa beriringan sejalan dengan visi misi dari hierarkhi pusat sampai desa. Artinya ketika Muslimat NU memiliki program kerja yang sejalan dengan masalah pembangunan gender, maka sejalan dengan

visi misi yang ditetapkan, maka dukungan Muslimat NU berpotensi besar mempengaruhi kebijakan pembangunan gender.

2. Bidang organisasi cukup lengkap untuk mendukung keberhasilan pembangunan gender, yaitu mencakup : a) Organisasi dan Keanggotaan; b) Pendidikan dan Kaderisasi; c) Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup; d) Kesehatan; e) Dakwah; f) Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis; g) Tenaga Kerja; h) Hukum dan Advokasi.
3. Para anggota Muslimat NU memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemimpinannya, atau nilai *trust* pada sosok ketua organisasi, sehingga sangat jarang pimpinan Muslimat NU baik di tingkat pusat sampai daerah yang hanya memimpin satu kali periode kepemimpinan.
4. Para pengurus MNU memiliki nilai-nilai organisasi yang sangat kuat dengan ikatan yang mendarah daging sejak kecil, berawal dari ikatan sebagai warga nadliyin, kemudian berkembang menjadi keterlibatan dalam organisasi NU dan Muslimat, sejak dalam lingkungan keluarga NU. Sebagai pengurus Muslimat NU, mereka dipenuhi oleh jiwa kesadaran, keikhlasan hati, rasa tanggung jawab dan panggilan jiwa.
5. Muslimat NU memiliki jaringan yang cukup kuat dalam GOW (Gabungan Organisasi Wanita) sehingga sangat memungkinkan bekerja sama untuk mendukung kebijakan pembangunan gender. Selain itu, Muslimat NU juga memiliki jaringan ormas underbow NU lainnya seperti IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Anshor, dan sebagainya.

Kecintaan aktivis Muslimat NU terhadap Muslimat dan NU dalam kerangka besar kecintaan kepada Islam, dan tentu saja Al-Quran dan Hadist. Bahwasanya dalam Islam diyakini bahwa Allah akan memperlakukan umatnya yang baik jika mereka juga melakukan kebaikan, baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks demikian, perempuan aktivis

Muslimat juga meyakini bahwa Allah memberikan posisi yang sangat mulia terhadap perempuan, sampai-sampai ada surat Annisa dalam Al-Qur'an dengan segala uraiannya. Bahkan mereka yang ditempatkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi kaumnya. Keyakinan yang demikian banyak mendasari para aktivis Muslimat untuk berkontribusi di manapun berada, mulai dari tingkatan kepengurusan ranting (desa), anak cabang (kecamatan), cabang (kabupaten), dan seterusnya ke atas. Banyak mereka yang menjadi aktivis Muslimat juga memulainya dari sejak mereka remaja sampai usia lanjut. Semata-mata keterlibatan tersebut karena keyakinan kepada Tuhannya untuk dapat hidup yang bermanfaat bagi sesamanya, dan juga kepada organisasi kebanggannya, Muslimat NU.

5.3. Menatap Organisasi Muslimat NU sebagai Kekuatan Politik

Pembahasan mengenai kekuatan politik organisasi perempuan tidak bisa dilepaskan dari keprihatinan mengenai rendahnya keterwakilan politik perempuan dalam legislatif nasional hingga daerah. Sejak hak-hak politik perempuan disuarakan dalam Kongres Umum Perempuan Indonesia III di Bandung Juli 1938, hingga hari ini keterwakilan politik perempuan belum berimbang dengan jumlah populasi kaum perempuan di Indonesia (Cora Vreede-De Stuers, 2008). Kongres tersebut secara tegas menyatakan tentang tuntutan hak perempuan untuk memilih. Setelah kemerdekaan tahun 1945, tuntutan kaum perempuan dipenuhi dengan penegasan dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kebangkitan pergerakan organisasi perempuan mulai mengerucut dengan diselenggarakannya Kongres Umum Perempuan I di Yogyakarta. Pelaksanaan Kongres pertama tersebut, hingga hari ini diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia, yaitu pada 22 Desember 1928.

Jika menengok pada masa yang lebih lampau, pergerakan organisasi perempuan dipengaruhi upaya Kartini untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan pendidikan bagi kaum perempuan. Perjuangan yang dilakukan Kartini kemudian mengilhami tumbuhnya organisasi perempuan pada tahun 1912 (Takashi Siraishi, 1997). Sama halnya dengan pergerakan organisasi yang mengiringi kebangkitan nasional sejak Budi Utomo berdiri tahun 1908, organisasi perempuan yang berkembang ketika itu lebih banyak berkiprah dalam bidang sosial ekonomi, belum menyentuh aspek politik. Studi Isnaeniyah mencatat bahwa organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika tahun 1912 yang diketuai oleh Theresia Sabarudin (Erni Isnaeniyah, 2017).

Namun demikian, ketika sudah memasuki era setelah kemerdekaan, kekuasaan Orde Baru yang begitu represif nyaris menenggelamkan pergerakan organisasi perempuan yang mengerucut pada tampilnya di ranah politik. Meskipun pemerintah Orde Baru memiliki *political will* membentuk kementerian yang khusus menangani perempuan, namun kaum perempuan menjalankan peran sosial-politik hanya sebatas fungsi normatif. Secara eksplisit, pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan yang menempatkan peranan perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga (Shirin Rai, 2002). Orde Baru mewujudkannya dengan menyatukan perempuan Indonesia dalam satu wadah, Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi. Pada prinsipnya politik gender Orde Baru mendasarkan pandangannya bahwa perempuan Indonesia adalah kelompok homogen yang apolitis dan harus berperan sesuai kodratnya sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam urusan domestik.

Rendahnya keterwakilan politik perempuan selama era pemilu Orde Baru menjadi bukti represi Orde Baru terkait hak-hak politik perempuan. Pemerintah Orde Baru memiliki kepentingan agar kaum perempuan Indonesia memiliki kepatuhan terhadap kepentingan politik

Orde Baru melalui Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan juga PKK (Ruth Indiah Rahayu, 2004). Melalui ketiga organisasi tersebut praktek politik perempuan Orde Baru telah menempatkan perempuan sebagai istri yang mendukung karir suami dan menopang kekuasaan negara. Dengan demikian keterwakilan politik perempuan ketika itu sangat terbatas.

Meskipun perolehan kursi perempuan naik menjadi 7,8 persen pada Pemilu 1971 dari 5,9 persen pada Pemilu 1955, namun angka keterwakilan perempuan tersebut masih jauh dari harapan. Bahkan pada Pemilu 1977, keterwakilan perempuan turun menjadi 6,3 persen. Pada Pemilu 1982, perolehan kursi untuk perempuan naik menjadi 9,3 persen. Demikian pula pada Pemilu 1987, keterwakilan perempuan naik lagi menjadi 11,6 persen dan mencapai 12,6 persen pada Pemilu 1992. Namun pada pemilu terakhir pemerintahan Orde Baru, keterwakilan perempuan turun menjadi 10,8 persen (Pemilu 1997) (UNDP, 2010).

Keberhasilan utama upaya keterwakilan politik perempuan pada Era Reformasi ditandai dengan ketentuan kuota 30 persen perempuan di parlemen, sejak ditetapkannya UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Kelahiran berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil dari perjuangan organisasi perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Indonesia (KPI), dan sebagainya. Dalam konteks peta kekuatan politik, upaya peningkatan keterwakilan pada umumnya dimonopoli oleh partai politik yang melahirkan banyak aktor politik yang maju dalam politik nasional hingga daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, peta kekuatan politik tidak hanya diisi oleh partai politik. Dalam hal ini, terdapat banyak kelompok di masyarakat yang dapat bergerak menjadi kekuatan politik tertentu, seperti kelompok keagamaan, kelompok buruh, kelompok perempuan, kelompok berbasis profesi dan sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, kelompok perempuan yang direpresentasikan oleh organisasi perempuan, sesungguhnya dapat menjadi kekuatan politik yang strategis.

Kajian ini dikhususkan untuk mengkaji keorganisasian perempuan, khususnya organisasi perempuan Islam. Keberadaan organisasi perempuan Islam di Indonesia yang dimotori oleh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Aisyiah Muhammadiyah. Studi ini mengkhususkan mengkaji Muslimat NU sebagai organisasi *underbow* Nahdaltul Ulama (NU). Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, eksistensi kegiatan perempuan Muslimat NU sudah dikenal sangat luas. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarkhi dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat kultural sebagai pengikut jamaah *nahdliyin* dalam kerangka besar organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai warga *nahdliyin*, mereka cenderung memiliki kepatuhan yang cukup tinggi kepada pemimpin mereka, baik kepada kyai, nyai ataupun yang mereka tempatkan sebagai guru atau ustadz/ustadzah.

Kontribusi Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Muslimat NU adalah organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk memajukan kehidupan kaum perempuan dan keluarganya. Mereka banyak bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan, dan kesehatan. Muslimat NU juga mengelola berbagai lembaga pendidikan dan panti asuhan untuk yatim piatu ataupun lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Di bidang kesehatan, mereka juga mengelola klinik rumah bersalin ataupun rumah sakit. Mereka juga mengembangkan koperasi dan usaha ketrampilan produktif lainnya yang dikelola secara mandiri oleh para anggotanya.

Di sisi lain, alam reformasi telah bergerak mengembalikan naluri alamiah warga *nahdliyin* untuk ikut serta dalam perhelatan politik, dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjadi partai politik pilihan utama warga *Nahdliyin* ketika momentum politik membuka ruang yang luas bagi pembentukan partai.

Ketika itu, NU tetap bersikukuh untuk menjalankan Khittah 1926 sebagai organisasi di bidang sosial keagamaan, sehingga hasrat politik warga NU paling banyak disalurkan melalui PKB. Sejak mengikuti pemilihan umum (Pemilu) pertama era reformasi, yaitu tahun 1999, PKB menjadi salah satu partai politik yang bertahan di papan menengah hingga pemilu yang terakhir.

Sebagai bagian dari organisasi besar NU, kiprah Muslimat NU tidak pelak dalam beberapa hal ikut terseret dalam arus politik yang terus bergulir. Dedikasi mereka yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi menunjukkan mereka adalah kaum perempuan yang mampu mengisi ruang-ruang non-politik dan ekonomi yang tidak diisi oleh negara dan jauh dari kekuasaan. Secara keorganisasian, Muslimat NU juga tetap merupakan organisasi perempuan nahdliyin yang bergerak di bidang sosial, ekonomi dan keagamaan. Namun demikian, persentuhan dengan dunia politik bukan hal yang mudah untuk dihindari. Ikatan sebagai sebuah organisasi besar dengan keanggotaan yang banyak tersebar dari perkotaan hingga perdesaan menjadikan banyak aktivis Muslimat bersinggungan dengan kegiatan politik. Antara lain hal itu tercermin dengan keikutsertaan para aktivis Muslimat NU dalam perhelatan besar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, ataupun pemilihan anggota legislatif pusat hingga kabupaten.

Jika menilik sejarah terbentuknya Muslimat NU tidak lepas dari keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk yang telah lebih dulu berkembang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai relasi Muslimat NU dengan negara tidak bisa lepas dari bagaimana NU sebagai organisasi utama yang menaungi Muslimat memiliki relasi dengan negara. NU adalah organisasi keagamaan yang didirikan oleh para ulama yang memiliki wawasan keagamaan, dengan memegang teguh salah satu mazhab. Secara terminologinya nahdlatul ulama berarti

kebangkitan para ulama. Organisasi NU didirikan secara formal pada 31 Januari 1926 di Surabaya.

Setelah beberapa dasa warsa, NU berkembang melebar dari garis-garis perjuangan (Khittah 1926) yang telah dirumuskan. Persentuhan NU dengan dunia politik dimulai ketika NU masuk menjadi anggota MIAI (Majlisul Islam A'la Indonesia) tahun 1939 (<http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu> diakses tanggal 1 Juni 2019). Meskipun MIAI adalah organisasi keagamaan, namun kegiatan MIAI sarat dengan muatan politik. Kelak MIAI berubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Semasa pendudukan Jepang dan perang mempertahankan kemerdekaan, NU terlibat dalam kegiatan politik dengan membentuk kekuatan militer Hizbullah. Selanjutnya NU secara resmi menjadi organisasi politik pada tahun 1952. Ketika itu, NU menyatakan diri keluar dari Masyumi dan memutuskan untuk berubah menjadi partai politik.

Pada masa tersebut, Muslimat NU sudah berdiri sebagai organisasi perempuan muslimah yang menjadi underbow NU. Pada saat penyelenggaraan Mukhtamar NU di Surabaya pada tahun 1954, disepakati agar aktivis Muslimat NU dapat dicalonkan menjadi anggota DPR-DPRD dan konstituante sebagai calon prioritas. Ketika Pemilu 1955 dilaksanakan, partai NU menjadi salah satu kontestan pemilu. Keikutsertaan partai NU dalam pemilu tersebut membuahkan hasil sebagai pemenang pemilu peringkat ke-3 dengan perolehan suara 18,4% atau memiliki 45 kursi di parlemen. Adapun Partai Masyumi menempati peringkat ke-2 setelah PNI dan NU menempati peringkat ke-3 di atas PKI (Herbert Feith, 1999).

Dalam pemilu tahun 1955 tersebut, NU mendapat 45 kursi. Dari sejumlah kursi tersebut, Muslimat NU memiliki lima wakil (11 persen) dari seluruh perwakilan Partai NU. Kelima tokoh Muslimat NU yang menjadi anggota DPR saat itu adalah; Ny Machmudah

Mawardi (Jateng), Ny Maryam Kantasumpena (Jateng), Ny Maryama Djunaidi (Jatim), Hadiniyah Hadi (Jatim), dan Ny Asmah Syahrini (Kalsel). Adapun untuk Konstituante, Muslimat NU menempatkan enam orang wakilnya, sedangkan di MPR, Muslimat NU menempatkan dua orang kadernya menjadi anggota MPR.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, seiring dibubarkannya Masyumi oleh Soekarno, Partai NU menjadi partai umat Islam yang terbesar. Kiprah NU dalam Demokrasi Terpimpin ditandai dengan sikap akomodatif NU dengan menerima konsep Nasakom, namun tetap menolak komunisme. Nasakom adalah ideologi yang diusung oleh Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Penerimaan NU terhadap Nasakom didasarkan atas nilai-nilai Islam, yaitu *ma la yudraku kulluhu la yudraku ba'dhuhu* yang berarti apa yang tidak dapat diraih keseluruhan, sebagian (yang dapat diraih) jangan dilepaskan (Kacung Marijan, 1992). Pada tahun 1960, ketika kekuasaan Soekarno berlansung sangat kuat melalui pemberlakuan Demokrasi Terpimpin, Soekarno melakukan pembubaran DPR dan membentuk DPR Gotong Royong. Saat itu, wakil dari Muslimat bertambah dua orang, di mana lima orang wakil sebelumnya tetap menjadi anggota DPR Gotong Royong.

Ketika perkembangan PKI signifikan pada era tersebut, NU mengambil posisi sebagai pihak yang konfrontatif melawan PKI, dengan kekuatan utama dari unsur pemuda Anshor. Dalam hal ini, Muslimat NU ikut merespon terhadap masifnya perkembangan PKI ketika itu. Muslimat menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dalam hal bongkar pasang senjata, menanggulangi bahaya kebakaran, mengelola dapur umum, keperawatan, dan ketrampilan lain yang diperlukan dalam keadaan darurat. Ketika itu kegiatan Muslimat NU dipusatkan di Gedung Pusat Hansip Salemba Raya pada tahun 1964. Ketika pemberontakan G 30 September 1965 meletus, Muslimat NU menjadi salah satu organisasi yang menuntut pembubaran PKI.

Demonstrasi dilakukan bersama dengan organisasi perempuan lainnya yang anti PKI. Tuntutan yang diajukan oleh Muslimat NU ketika itu antara lain agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengambil alih TK Melati yang dikelola oleh Gerwani (Martin van Bruinessen, 1994).

Selanjutnya sepanjang kekuasaan Orde Baru, dapat dikatakan hubungan NU dengan rezim berkuasa kurang harmonis. Pada Pemilu 1971 NU masih memperoleh suara 18,7% dari keseluruhan suara masuk. Perolehan suara itu menunjukkan posisi NU masih menjadi kekuatan politik yang cukup dominan dan tidak bisa diabaikan. Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru mengharuskan fusi partai dan NU bersama-sama dengan PSII, Parmusi dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada penyelenggaraan Pemilu 1977, kekuatan NU dalam PPP berkurang seiring ketetapan untuk membagi kekuatan dalam semua unsur PPP (Martin van Bruinessen, 1994).

Sejalan dengan fusi yang dilakukan oleh NU dalam PPP, maka hal itu juga menjadi tantangan berat bagi Muslimat. Ketetapan Orde Baru untuk penyederhanaan partai tersebut, juga menjadikan pegawai negeri atau istri pegawai negeri, guru, dan karyawan BUMN merasa takut untuk terlibat dalam kegiatan Muslimat NU. Dengan kata lain, kebijakan Orde baru untuk mengkooptasi gerakan perempuan di Indonesia, juga berdampak pada bagaimana Muslimat NU dapat terus tumbuh dan berkembang. Dengan adanya ketakutan atau kekawatiran perempuan nahdliyin yang menjadi istri para pegawai negeri misalnya, menjadikan tidak semua perempuan nahdliyin dapat berpartisipasi dalam kegiatan Muslimat NU karena mengawatirkan posisi atau jabatan suaminya. Dengan demikian, ketika hubungan NU dan pemerintah Orde Baru berjalan kurang harmonis atau tersegregasi, maka keberadaan Muslimat NU ikut juga terdampak atau ikut termarginalkan.

Adapun Pemilu 1982 adalah puncak polarisasi dari kekuatan-kekuatan dalam unsur PPP. Situasi demikian menjadikan NU menyatakan diri keluar melalui keputusan yang diambil dalam Mukhtar di Situbondo tahun 1983. Sejak itulah NU menetapkan diri kembali pada Khittah 1926 sebagai garis perjuangan NU dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Berkaitan dengan kembalinya NU ke Khittah 1926, hal itu juga menjadikan Muslimat memiliki kesempatan untuk berkembang sebagai organisasi sosial keagamaan sesuai dengan Khittah NU 1926 hingga sekarang ini (Martahan Sitompul, 1989).

Seiring kejatuhan rezim Orde Baru pada Era Reformasi, muncullah begitu banyak partai politik yang merepresentasikan beragam kelompok yang ada di masyarakat. Warga *nahdliyin* yang konsisten memegang Khittah 1926 tetap menjadikan NU tetap sebagai organisasi sosial keagamaan. Namun demikian, hasrat terpendam untuk ikut serta berkecimpung dalam politik disalurkan melalui pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998. Inisiator berdirinya PKB adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikenal sebagai cucu ulama terkemuka NU yaitu KH. Hasyim Asyari. Pendirian PKB juga didukung oleh ulama-ulama terkemuka NU seperti KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Mustofa Bisri, KH. Muhith Muzadi, dan sebagainya. Berturut-turut dari Pemilu 1999, PKB secara nasional memperoleh suara 12,61 persen dan pada Pemilu 2004 mendapatkan 10,57 persen. Selanjutnya pada Pemilu 2009 mendapatkan 4,94 persen, dan pada Pemilu 2014 mendapatkan suara 9,04 persen. PKB tumbuh dan berkembang menjadi partai yang memiliki basis massa utama dari warga *nahdliyin*. Adapun NU tetap menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga kini (<http://www.nu.or.id> diakses 9 September 2019).

Dalam konteks tersebut, hubungan kelembagaan atau hubungan formal antara Muslimat NU dengan PKB sesungguhnya juga tidak ada. PKB notabene adalah partai politik yang

didirikan oleh warga NU. Demikian pula, Muslimat NU juga tidak memiliki hubungan formal dengan partai politik yang lain, seperti PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat dan partai politik lainnya. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa kecenderungan umum para kader perempuan nahdliyin ataupun mereka yang menjadi kader Muslimat NU, partisipasi mereka atau bahkan mungkin aktivitas politik mereka, lebih banyak di lingkungan PKB. Berkaitan dengan keberadaan PKB tersebut, maka tidak bisa dipungkiri bahwa banyak aktivis perempuan dari Muslimat NU yang turut berkembang dalam arena politik nasional maupun daerah. Dengan demikian, ketika NU dan Muslimat NU tetap teguh memegang Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan, namun tidak bisa dihindari banyak tokoh-tokoh politik yang lahir dari situasi tersebut.

Dalam konteks perempuan tokoh politik dari kalangan Muslimat NU, ingatan publik tidak akan lepas dari sosok Khofifah Indar Parawansa yang menjadi Ketua Muslimat NU nasional sejak tahun 2000. Khofifah yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023 yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Sosial masa Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Uraian panjang lebar tentang kiprah Khofifah Indar Parawansa akan dikupas dalam bab berikutnya.

Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), semakin banyak aktivis Muslimat NU yang tampil dan berhasil dalam memenangkan kontestasi tersebut. Dalam waktu bersamaan dengan terpilihnya Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur melalui Pilkada serentak tahun 2018, beberapa aktivis Muslimat NU lainnya yang terpilih Munjidah Wahab yang terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2018-2023 dalam Pilkada 2018. Munjidah Wahab adalah Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Jombang, wakil bupati incumbent, sekaligus

mantan anggota DPRD Jombang. Selain itu, Ika Puspita Sari, bendahara PC Muslimat NU Mojokerto juga terpilih sebagai Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Mojokerto 2018. Demikian pula Umi Azizah, yang terpilih sebagai Bupati Tegal dalam Pilkada 2018. Umi Azizah adalah ketua PC Muslimat Tegal. Pada periode sebelumnya, Umi Azizah adalah incumbent wakil bupati yang naik menjadi Bupati Tegal karena bupati Tegal sebelumnya wafat pada periode pertengahan kepemimpinannya. Adapun Ana Mu'awanah yang menjadi Sekretaris PC Muslimat Bojonegoro juga terpilih sebagai Bupati Bojonegoro dalam gelaran Pilkada Bojonegoro 2018. Mengingat keberadaan Muslimat NU adalah organisasi perempuan Islam yang bergerak dalam ranah sosial keagamaan dan tetap mengacu Khittah 1926 bukan sebagai organisasi politik, tampilnya aktivis Muslimat NU dalam kontestasi dan memenangkan perebutan kursi gubernur, bupati ataupun walikota adalah sesuatu yang menarik.

5.4 Mengukur Potensi Kader Muslimat NU Kabupaten Banyumas dalam Pemilu Legislatif

Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 memberikan harapan baru bagi upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan, khususnya di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini terdapat tren peningkatan yang positif terkait jumlah anggota legislatif perempuan di legislatif daerah, meskipun masih belum mencapai angka 30 persen sesuai harapan diberlakukannya kuota 30 persen yang merupakan kebijakan afirmasi. Pada periode 2014-2019 dari 45 anggota legislatif Banyumas, terdapat 18 persen anggota perempuan, masih jauh dari angka 30 persen, namun angka tersebut tidak terpaut jauh dengan capaian nasional yaitu 17,32 persen.

Dalam analisis Hubeis (2010) bahwa situasi politik yang ada masih menempatkan para perempuan politisi dalam situasi diskriminasi politik berbasis gender yang membuat mereka tidak lagi menjadi mitra politik yang dikawal dengan *affirmative action* (kuota 30 persen keterwakilan perempuan), melainkan harus berjuang sendiri sebagai layaknya seorang politisi

kawakan yang harus berjuang dengan prinsip-prinsip demokratis dan *fairness*. Artinya kebijakan afirmasi belum diikuti oleh kebijakan yang melapisi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai target sesuai yang diharapkan. Dengan kondisi ini ketimpangan gender dalam bidang politik akan tetap tinggi.

Capaian 18 persen pada Pemilu Legislatif 2014, sudah merupakan kenaikan yang cukup menggembirakan, namun hasil tersebut masih jauh dari harapan, sejak kebijakan afirmasi diberlakukan pada Pemilu 2004. Pada tahun 2019 ini jumlah anggota legislatif perempuan meningkat 4 persen dibanding pada sebelumnya sebagaimana terlihat pada Tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dan 2019

No	Partai	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2015	2019	2015	2019	2015	2019
1.	PDI - P	12	13	4	4	16	17
2.	PKB	4	5	3	3	7	8
3.	Gerindra	5	5	1	2	6	7
4.	Partai Golkar	6	6	0	0	6	6
5.	PKS	4	3	0	1	4	4
6.	PAN	4	3	0	0	4	3
7.	PPP	3	1	0	1	3	2
8.	Nasdem	1	2	0	0	1	2
9.	Demokrat	3	1	1	0	3	1
Banyumas		41	39	9	11	50	50
Persentase		82,0	78,0	18,0	22,0	100%	100%

Sumber: Direkap dari berbagai sumber

Berdasarkan Tabel 3 di atas jumlah anggota legislatif mengalami peningkatan dari 18 persen pada pemilu tahun 2014 menjadi 22 persen pada pemilu tahun 2019 atau meningkat 4

persen (penambahan 2 orang). Penambahan suara diperoleh dari Partai Gerindra dan PKS. Dari 9 partai yang memiliki kursi di DPRD, perempuan hanya tersebar dalam 5 partai. Perempuan terbanyak berasal PDI-P (4 kursi dari 11 kursi perempuan). Hal ini dapat dipahami mengingat PDI-P menguasai sekitar 30 persen kursi yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas.

Tren peningkatan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banyumas sudah dimulai sejak era reformasi. Pada Pemilu 1999, jumlah anggota legislatif perempuan 4 perempuan (9 persen) dan laki-laki 41 orang; sedangkan pada Pemilu 2004, jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 7 orang (15 persen), dan laki-laki 38 orang; dan pada Pemilu 2009, anggota legislatif perempuan 8 orang (16 persen) dan laki-laki 42 orang (*kab-banyumas.kpu.go.id* diakses 11 November 2019). Bagaimanapun keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan indikator penting untuk melihat bagaimana perempuan memiliki *bargaining power*, di mana perempuan bisa terlibat dalam keputusan-keputusan politis yang strategis untuk kemaslahatan umat, khususnya menyangkut perbaikan kaum perempuan.

Dalam konteks penelitian ini, kenaikan anggota legislatif perempuan di Banyumas perlu dikaji lebih mendalam, sejauh mana kader-kader Muslimat NU ikut berkiprah didalamnya. Dalam pentas pemilu legislatif tahun 2019 di level nasional, para kader Fatayat NU yang *notabene* sama-sama *under-bow* dari Nahdlatul Ulama (NU), banyak yang berhasil sebagai anggota DPR. Mereka adalah Anggia Ermarini, Ketua Umum PP Fatayat NU; Nur Nadlifah Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan PP Fatayat NU; Siti Mukaromah, ketua Bidang Advokasi, Hukum, dan Politik PP Fatayat NU; Eem Marhamah, Sekretaris Bidang Dakwah PP Fatayat NU; Arzeti Bilbina Koordinator Bidang Ekonomi PP Fatayat NU; Nihayatul Wafiroh Wakil Koordinator Bidang Advokasi Hukum dan Politik PP Fatayat NU; Ela Siti Nuryaman Anggota Bidang Kesehatan PP Fatayat NU; serta Wartiah Ketua PW Fatayat NU NTB dan Ema

Umiyyatul Chusnah, ketua PC Fatayat NU Jombang. Fatayat NU merupakan organisasi perempuan underbow NU, selain Muslimat NU, yang beranggotakan kader perempuan *muslimah* yang lebih muda. Seluruh pengurus Fatayat NU yang terpilih menjadi anggota pemilu legislatif berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kecuali Wartiah dan Ema Umiyyatul Chusna yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam penjelasan ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, Laily Manshur, bahwa pada era pemilu legislatif ini, tidak ada kader Muslimat NU yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Lebih lanjut Laely Manshur menjelaskan bahwa sebenarnya banyak dari kader-kader Muslimat NU yang bagus dan memiliki potensi untuk didorong masuk dalam kontestasi politik (*Wawancara tanggal 26 Juni 2019*). Namun demikian, hingga sekarang masih sedikit dari mereka yang berminat ikut aktif dalam politik. Hal tersebut disebabkan sumberdaya ekonomi yang kurang, dan kemampuan mereka sebagai sumberdaya politik belum cukup mendukung untuk memasuki kehidupan politik praktis. Dalam proses aktivitas keseharian dalam organisasi Muslimat, juga tidak ada program kegiatan terencana dan khusus berupa pelatihan pendidikan politik atau sejenisnya.

Penjelasan dari Laily Manshur tersebut sejalan dengan tanggapan para kader Muslimat NU Kabupaten Banyumas dalam forum yang diselenggarakan tanggal 28 Juli 2019, bertajuk *Penguatan Kapasitas Muslimat NU dalam Kepemimpinan*, yang diselenggarakan di Gedung Muslimat NU. Dalam forum tersebut terungkap bahwa, umumnya kader Muslimat NU yang ingin mengikuti pemilu legislatif, mengeluhkan banyaknya dana yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pencalonan hingga selesai. Hal yang dimaksudkan adalah ketidakpahaman dan ketidakmampuan mereka jika mengikuti pencalonan anggota legislatif namun harus menghadapi *money-politics*.

Selain itu, mereka mengakui bahwa tidak semua kader Muslimat NU memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk tampil di depan publik. Dengan kata lain, kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Muslimat NU belum merata. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mereka memerlukan pelatihan secara khusus yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan dan wawasan politik. Kepemimpinan dalam hal ini terkait dengan proses atau kegiatan untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan perempuan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan organisasi, berdasarkan pertimbangan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing (Triwuryaningsih, 28 Juli 2019).

Fenomena banyaknya kepemimpinan di lingkup Muslimat NU yang memimpin dalam banyak periode memang menunjukkan sisi positif, yaitu ketaatan dan kepercayaan yang tinggi pada pemimpin mereka sehingga secara keorganisasian lebih solid. Namun demikian hal tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu kurang masifnya kaderisasi dalam tubuh Muslimat NU, karena pergantian kepemimpinan yang lama dari periode ke periode (Soetji Lestari, 2017). Oleh karena itu, dapat dimaklumi kalau dalam tubuh Muslimat NU memiliki kader yang bagus, namun secara kualitas tidak merata pada semua anggota kader.

Sebagai organisasi Islam perempuan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, Muslimat NU memiliki AD ART yang memang menegaskan tidak berkiprah di ranah politik. Demikian pula, sebagai organisasi Islam perempuan berada dalam *under-bow* Nahdlatul Ulama (NU), tentunya Muslimat NU tetap mengikuti *Khittah 1926*, sebagai pedoman berorganisasi dan bermaslahah untuk umat beragama, bangsa dan bernegara. Namun demikian, seiring dengan arus perkembangan politik dan era demokratisasi yang semakin terbuka, sedikit banyak keberadaan

Muslimat NU tidak dapat terpisah begitu jauh dari dunia politik, khususnya secara perorangan atau kader-kader secara pribadi.

Menjadi kader politik adalah bagian dari proses lebih lanjut dari pengalaman-pengalaman mereka mengelola dan mengembangkan organisasi. Oleh karena itu menjadi kader politik sesungguhnya adalah keniscayaan yang menyertai perjalanan mereka di organisasi, dan menjadi kader politik yang unggul juga bukan merupakan hal yang mustahil bagi mereka. Tren positif peningkatan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banyumas, seyogyanya juga menginspirasi Muslimat NU untuk melahirkan kader-kader mereka yang siap masuk ke ranah politik, meskipun tidak secara organisasional.

5.5. Luaran yang Dicapai

2019	Buku Monograf	Terbit (saat ini berupa naskah)	Judul: Kekuatan Politik Organisasi Perempuan Islam
2019	Jurnal Nasional Terakreditasi	Publish	Judul : Reading Participation on Populism Politics Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Unnes Semarang
2019	Buku Panduan /Buku Pintar yang memiliki Hak Cipta	Terbit (saat ini berupa naskah)	Judul : Pengintegrasian Program Muslimat NU dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
2019	Seminar Nasional	Naskah dan Letter Acceptance	Seminar Nasional LPPM Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal
2019	Submit Jurnal Internasional	Bukti Submit dan Artikel	Asian Journal of Women's Studies Ewha University, South Korea

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan Muslimat NU sebagai organisasi perempuan Islam yang memiliki jumlah anggota yang sangat banyak, tersebar ke pelosok perdesaan, sesungguhnya juga memiliki potensi sebagai organisasi yang memiliki kekuatan politik. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarkhi dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat mengakar dan mendalam sehingga mendukung posisi strategis Muslimat NU. Kalaupun keberadaannya sesuai AD ART adalah ormas sosial keagamaan, tetapi kader-kader Muslimat NU memiliki potensi sebagai kandidat dalam pemilu legislatif ataupun pemilu kepala daerah. Selain itu, anggota Muslimat NU yang sangat banyak, sedikit banyak juga mendorong potensi mereka sebagai basis pendulang suara dalam pemilu legislatif ataupun pilkada.

Kekuatan sosial politik Muslimat NU antara lain ditandai dengan banyaknya kader muslimat yang terpilih sebagai bupati dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Bersamaan dengan terpilihnya Khofifah (ketua Muslimat NU Pusat) sebagai Gubernur Jawa Timur melalui Pilkada serentak tahun 2018, beberapa aktivis Muslimat NU lainnya yang terpilih. Antara lain, yaitu Munjidah Wahab sebagai ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Jombang terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2018-2023 dalam Pilkada 2018. Demikian pula Umi Azizah, yang terpilih sebagai Bupati Tegal dalam Pilkada 2018. Umi Azizah adalah ketua PC Muslimat Tegal. Mengingat keberadaan Muslimat NU adalah organisasi perempuan Islam sosial keagamaan dan tetap mengacu Khittah 1926 bukan sebagai organisasi politik, tampilnya aktivis Muslimat NU dalam kontestasi dan

memenangkan perebutan kursi gubernur, bupati ataupun walikota adalah sesuatu yang penting untuk membukakan pandangan semua pihak mengenai potensi mereka sebagai kekuatan politik.

Lebih lanjut hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan kemenangan Munjidah Wahab dalam Pilkada Jombang, sudah didahului oleh karir politiknya di DPRD Jombang sejak lama. Nama Wahab dibelakangnya juga sengaja dilekatkan untuk mendorong publisitas dirinya. Munjidah Wahab adalah ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang. Dirinya juga aktif berorganisasi sejak remaja namun pada level cabang (kabupaten). Eksistensinya sangat didukung oleh kekompakan PKB yang notabene sebagai partai yang dibentuk NU, serta didukung juga oleh segenap kader Muslimat NU setempat. Selanjutnya proses kemenangan Munjidah Wahab, cerita tentang Umi Azizah memenangkan Pilkada Tegal juga tidak lepas dari dukungan segenap kader Muslimat NU. Namun Umi Azizah adalah seorang kader yang merintis karir keorganisasiannya dari tingkat desa (anak ranting). Keberadaannya sebagai bupati saat ini juga mendorong kemanfaatan bagi kemajuan Muslimat NU. Pengalamannya dalam mengelola organisasi, sangat bermanfaat baginya dalam memimpin pemerintahan daerah saat ini.

Namun demikian, tidak semua kader Muslimat NU yang mengikuti pilkada berjalan lancar.. Kekalahan Laily Manshur sebagai ketua Cabang Muslimat NU Banyumas tiga periode dalam pencalonan wakil bupati Banyumas memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya pengalaman dan pendidikan politik bagi kader-kader Muslimat. Keikhlasan dalam bekerja dan berbuat untuk sesama tak pelak sering dimanfaatkan dalam kerasnya pertarungan dalam dunia politik. Keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengalaman dan wawasan politik bagi kader-kader Muslimat, meskipun bukan secara keorganisasian Muslimat NU mengambil posisi sebagai organisasi politik. Perkembangan politik yang terjadi mau tidak mau mengarahkan Muslimat NU pada situasi dan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, situasi saat ini

di mana masih cukup banyak aktivis Muslimat NU yang memiliki kemampuan sumber daya merata dalam organisasi, belum semua memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk tampil di depan publik, serta belum semua paham bagaimana memenangkan sebuah kontestasi dalam pilkada lokal, kiranya membutuhkan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik yang memadai. Penggalan informasi yang diperoleh dalam forum FGD dengan para Pengurus Cabang Muslimat Banyumas menegaskan kebutuhan tersebut. Saat ini kebutuhan mengenai hal tersebut saat ini menjadi hal yang tak terelakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, Muthiah, 2004. *Civil Society and Political Change in Asia*, Stanford California: California University Press.
- Feith, Herbert, 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Handayani Trisakti, dan Sugiarti, 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang UMM Press.
- [http:// www.pkb.id](http://www.pkb.id) diakses tanggal 8 Juni
- [http:// www.pkb.id](http://www.pkb.id) diakses tanggal 8 Juni 2019.
- <http://kpu-banyumaskab.go.id> diakses 11 November 2019
- Hubeis, Aida Vitayala S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor.
- Karim, A Gaffar, 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia* , Yogyakarta : LkiS
- Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, 2013. *Pembangunan Berbasis Gender 2013*. Jakarta.
- Lestari, Soetji, Marwah, Sofa, Catur Pratiwi, Catur, *Model Hilirisasi Program Kerja Kelompok Perempuan Muslimat NU Terhadap Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah*, Laporan Penelitian Strategis Nasional, Kemenristekdikti, 2017.
- Isnaeniyah, Erni 2017. “Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU”, *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* Vol 2 1 Maret.
- Marijan, Kacung, 1992. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1992.
- M Rai, Shirin, 2002. *Gender and the Political Economy of Development*, Cambridge : Polity Press.
- Muslimat NU, PP. 1979. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta : PP Muslimat NU.
- Punch, Keith, 2006. *Developing Effective Research Proposal*, London: Sage Publication
- Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan* (Makalah Kebijakan), 2002. Jakarta : UNDP Indonesia.
- Pilcher, Jane dan Whelehan, Imelda, 2004. *50 Key Concepts in Gender Studies*, London : Sage Publication.
- Rahayu, Ruth Indiah, 2004. “Politik Gender Orde Baru : Tinjauan Organisasi Perempuan”, dalam Lisa Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta : LP3ES.

Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU, 30 Maret 2015, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu> diakses tanggal 1 Juni 2019

Sitompul, Martahan, 1989. *NU dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Strauss, Anslem dan Corbin, Juliet, 1990. *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory Procedur and Techniques*. Beverly Hills, SA: Sage Publications.

Triwuryaningsih, “Perempuan Memimpin”, *Forum FGD dengan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas*, 29 Juli 2019.

Van Bruinessen, Martin, 1994. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta : LkiS.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. DOKUMENTASI KEGIATAN**
- 2. COVER BUKU MONOGRAF : KEKUATAN POLITIK ORGANISASI ISLAM PEREMPUAN**
- 3. JURNAL TERAKREDITASI NASIONAL : POLITIK INDONESIA, INDONESIA POLITICAL SCIENCE REVIEW**
- 4. COVER BUKU PANDUAN : PENGINTEGRASIAN PROGRAM MUSLIMAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH**
- 5. SEMINAR LPPM 2019 : LOA DAN ARTIKEL ILMIAH**
- 6. ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL :**



Wawancara dengan Umi Azizah Bupati Tegal



Wawancara dengan Munjidah Wahab Bupati Jombang



FGD dengan Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas

BUKU MONOGRAF

**KEKUATAN POLITIK ORGANISASI
PEREMPUAN ISLAM**



Penulis:

Sofa Marwah, Soetji Lestari, Oktafiani Catur Pratiwi

**Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto
2019**

Buku Monograf

KEKUATAN POLITIK ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM

Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Pertama Tahun 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Penulis	: Sofa Marwah, Soetji Lestari, Oktafiani Catur Pratiwi
Penelaah Subtansi	: Dr. Riris Ardhanariswari, M.Hum
Penyelarasa Bahasa	: Siti Junawaroh, M.Hum
Perancang Sampul	: Tim UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed
Penata Letak	: Tim UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed
Pracetak dan Produksi	: Tim UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed

Penerbit :



Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Prof. Dr. HR Boenyamin 708 Purwokerto

Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telp. 0281-635292 (hunting), 638337, 638795

Faksmile. 0281- 631802

www.unsoed.ac.id

ISBN :

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, phoprint, microfilm dan sebagainya

GLOSARIUM

<i>ahlu sunnah wal jamaah</i>	:	paham yang merupakan perpaduan antara tiga pilar utama ortodoksi Islam, yaitu akidah, syariah, serta akhlak
<i>nahdliyin</i>	:	sebutan bagi pengikut <i>ahlu sunnah wal jamaah</i> yang memiliki identitas kultural di bawah bimbingan kyai sebagai <i>jamaah</i> dan menjadi <i>jam'iyah</i> yang terorganisasi dalam Nahdlatul Ulama
<i>muktamar</i>	:	permusyawaratan tertinggi sebuah organisasi yang dihadiri oleh perwakilan organisasi membahas permasalahan utama organisasi
<i>khittah</i>	:	garis-garis perjuangan organisasi
<i>rama-biyunge wong Banyumas</i>	:	Bapak dan ibu masyarakat Banyumas

PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa atas rahmat dan ridlo-Nya, buku monograf “Kekuatan Politik Organisasi Perempuan Islam” bisa terselesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Buku ini merupakan bagian dari rangkaian proses penelitian yang berjudul *Model Hilirisasi Kelompok Perempuan Muslimat NU terhadap Pembangunan Gender di Daerah* yang didanai oleh Ristek Dikti. Penelitian ini berangkat dari persoalan isu-isu gender di daerah yang penanganannya tidak hanya membutuhkan sentuhan dari pemerintah, melainkan juga perlu kontribusi dari berbagai unsur masyarakat, termasuk dari kekuatan organisasi perempuan khususnya organisasi perempuan yang berbasis keagamaan yang memiliki massa cukup signifikan. Hal ini mengingatkan bahwa isu-isu gender di tingkat daerah membutuhkan komitmen aparat dan seperangkat aturan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan suatu daerah sudah mengintegrasikan isu gender. Selain itu, implementasi kebijakan pembangunan berperspektif gender tetap membutuhkan dukungan semua unsur masyarakat. Salah satu unsur masyarakat yang penting untuk dikaji dalam mendukung keberhasilan kebijakan pembangunan berperspektif gender di daerah adalah kelompok perempuan Muslimat NU, sebagai salah satu organisasi perempuan berbasis keagamaan yang memiliki kekuatan sosial politik yang besar.

Kekuatan sosial politik Muslimat NU antara lain ditandai dengan banyaknya kader muslimat yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Dalam waktu bersamaan dengan terpilihnya Khofifah (ketua Muslimat NU Pusat) sebagai Gubernur Jawa Timur melalui Pilkada serentak tahun 2018, beberapa aktivis Muslimat NU lainnya yang terpilih Munjidah Wahab yang terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2018-2023 dalam Pilkada 2018. Munjidah Wahab adalah Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Jombang. Selain itu, Ika Puspita Sari, bendahara PC Muslimat NU Mojokerto juga terpilih sebagai Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Mojokerto 2018. Demikian pula Umi Azizah, yang terpilih sebagai Bupati Tegal dalam Pilkada 2018. Umi Azizah adalah ketua PC Muslimat Tegal. Pada periode sebelumnya, Umi Azizah adalah *incumbent* wakil bupati yang naik menjadi Bupati Tegal karena bupati Tegal sebelumnya wafat pada periode pertengahan kepemimpinannya. Adapun Ana Mu’awanah yang menjadi Sekretaris PC Muslimat Bojonegoro juga terpilih sebagai Bupati Bojonegoro dalam gelaran Pilkada Bojonegoro 2018. Mengingat keberadaan Muslimat NU adalah organisasi perempuan Islam yang bergerak dalam

ranah sosial keagamaan dan tetap mengacu Khittah 1926 bukan sebagai organisasi politik, tampilnya aktivis Muslimat NU dalam kontestasi dan memenangkan perebutan kursi gubernur, bupati ataupun walikota adalah sesuatu yang menarik. Apalagi ditambah pada saat pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah tahun 2019 juga banyak kader muslimat yang terpilih, mereka tersebar di berbagai partai, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, eksistensi kegiatan perempuan Muslimat NU sudah dikenal sangat luas. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarkhi dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat mengakar dan mendalam sehingga mendukung posisi strategis Muslimat NU. Dukungan keanggotaan yang sangat banyak dan mendalam, menunjukkan potensi peran strategis anggota Muslimat NU untuk mendukung implementasi kebijakan berperspektif gender sekaligus menjadi *gender vocal point* di masyarakat.

Misi utama kami melalui buku ini adalah bagaimana organisasi perempuan (berbasis keagamaan) yang sering dipandang secara konvensional ini memiliki kekuatan potensial untuk ikut terlibat dalam mengatasi isu-isu gender baik di pusat maupun di daerah dengan cara mereka sendiri. Perlu cara tersendiri untuk melihat kekuatan politik mereka yang memungkinkan berbeda dengan kelompok/organisasi perempuan lainnya dalam menyuarakan aspirasi politiknya.

Dengan selesainya buku monograf ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku monograf ini dan berkontribusi memberikan informasinya, terutama kepada yang terhormat Ibu Laily Manshur (Ketua Muslimat NU Banyumas), Ibu Umi Azizah (Ketua Muslimat NU Kabupaten Tegal sekaligus Bupati Kabupaten Tegal), Ibu Munjidah Wahab (Ketua Muslimat NU Kabupaten Jombang sekaligus Bupati Kabupaten Jombang). Beliau-beliau ini adalah perempuan-perempuan muslimat NU yang luar biasa dalam membesarkan organisasi. Rasa terima kasih kasih yang dalam juga kami sampaikan kepada pihak DRPM Kemenristekdikti yang telah memberikan dukungan dana untuk penelitian ini, juga kepada pihak pimpinan LPPM Unsoed yang telah memfasilitasi jalannya penelitian ini. Terima kasih pula kepada Dr. Riris Ardhanariswari, SH., M.H yang bersedia mereview buku ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan bapak ibu semuanya.

Terlepas bahwa buku ini masih terdapat kelemahan dan keterbatasan di sana-sini, kami berharap buku ini bisa memberi manfaat, terutama untuk pemikiran tentang kajian gender dan gerakan-gerakan organisasi perempuan. Terima kasih

Purwokerto, November 2019

Tim Penulis

ISSN 2477 - 8060 (PRINT) ISSN 2503 - 4456 (ONLINE)
POLITICAL SCIENCE PROGRAM - UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
IN COOPERATION WITH THE INDOONESIAN INTER-UNIVERSITY ASSOCIATION FOR POLITICAL SCIENCE (APSIPOL)

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review

VOLUME 4
NUMBER 2
JULY 2019

- i-ii Notes from the Editors
Editorial Team
- 180-190 Distributive Politics and Manipulative Policy in Local Election
Dedy Hermawan, Robi Cahyadi Kurniawan
- 191-207 The Implementation of Sinking Illegal Fishing Vessels Policy Towards the Bilateral Relations between Indonesia and Malaysia
M. Adnan Madjid, Widodo, Eko G. Samudro
- 208-232 Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia
Moh. Ilham A. Hamudy, M. Saidi Rifki
- 233-254 The Dynamics of Public Policy for Non-Permanent Teachers in Semarang, Indonesia
Ngabiyanto, Daniel Daud Kameo, Pamerdi Giri Wiloso, Bambang Ismanto
- 255-273 Reading Women Participations on Populism Politics
Sofa Marwah
- 274-300 Bourdieu and Media Theory: Explaining Media's Changes and Continuities in The Post Authoritarian Countries
Wijayanto

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review has been accredited as a scientific journal by the Ministry of Research-Technology and Higher Education Republic of Indonesia No. 51/E/KPT/2017 December 4, 2017 period: 2017-2022

Politik Indonesia	Volume 4	Number 2	Page 000-000	Semarang July 2019	ISSN 2477-8060 (Print)
-------------------	----------	----------	--------------	--------------------	------------------------



ProdiPol • Unnes
Program Studi Ilmu Politik
Universitas Negeri Semarang

Reading Women Participations on Populism Politics

Sofa Marwah Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Abstract

This paper aims to elaborate on women participation on politic populist development and expansion of support by the strength of women's groups as representatives of civil society. The study uses literature study methods to discover various data related to women's figures and women's group dedication in the context of civil society, sourced from journal and preliminary study results. The results of the study indicate that women participate in the practice of populism associated with men in cultivating the issues of populism and are received by the general public. Even women's contribution to society tends to be closer to welfare issues that are echoed in populist politics. When the populism politics need to expand in the context of the wider society, women are also present and have been there for a long time dedicating their lives on social welfare issues. The implication, it is necessary to see women contributions are as important as men in the practice of populist politics, not only at the level of the political elite but also in the life of the wide society. Women's groups are able to fill spaces that are not filled by the state, i.e. socio-economic spaces, wherever women are.

Keywords

Women; Politics; Populism; Civil Society

INTRODUCTION

This paper aims to elaborate on the involvement of women in the contemporary political developments inherent in populism and the extension of populist support by the strength of women's groups as representations of civil society. Previous studies on populism did not relate the issue of populism with the ability of women political figures to process populist issues into a space to affirm women's position in order to

convince their constituents. Populism politics in Indonesia elaborated by some scholars, namely Mietzner (2014) which focus on Jokowi's won and a rise of populism; Hadiz (Aspinal, 2017) on the differences of Islamic populist trajectories in Indonesia and the Middle East; Djalil (2017) about the political compounds of identity and populism; Hadiz (2017) on cross-regional perspectives on populism in politics, Jokowi's leadership style became one of his focus; Mietzner (2018) emphasized Jokowi's respond to the unprecedented Islamist-populist mobilization in Jakarta in late 2016. From the gap of previous research on women and

Sofa Marwah is a lecturer at Departement Political Science, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia. She was graduated from Doctoral Program of Political Science, Universitas Indonesia. She is also Head of Gender, Children Research Center, and Community Service. Her research focus are politics, women, and cultural. Email: sofamarwah75@gmail.com

BUKU SAKU

**PENGINTEGRASIAN PROGRAM MUSLIMAT
DALAM PERENCANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
DI DAERAH**



ILUSTRASI

Oktafiani Catur Pratiwi
Sofa Marwah
Soetji Lestari

Tim Penelitian Terapan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto
2019

Buku Pintar

PENGINTEGRASIAN PROGRAM MUSLIMAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH

Penulis : Oktafiani Catur Pratiwi
Sofa Marwah
Soetji Lestari
Penyunting : Siti Junawaroh
Reviewer : Dr. Riris Ardhanariswari, M.Hum
Penata Letak : Tim UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed
Desain Cover : Tim UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed
Ilustrasi : Tim UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed

Copyright @diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

Tim Penelitian Terapan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal, Purwokerto Utara, Banyumas

Website : www.lppm.unsoed.ac.id

Cetakan Pertama : November 2019

Ukuran kertas

ISBN:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iii

BAB I. GENDER DAN PEMBANGUNAN

- 1.1. Apa yang dimaksud dengan gender?
- 1.2. Apa yang dimaksud dengan pembangunan?
- 1.3. Bagaimana posisi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan?

BAB II. MEMAHAMI PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN

- 2.1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan?
- 2.2. Mengapa perlu perencanaan dalam pembangunan?
- 2.3. Apa saja prinsip perencanaan?
- 2.4. Mengapa perempuan perlu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan?

BAB III. INTEGRASI PROGRAM MUSLIMAT DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Dimana ruang partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan?
- 3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- 3.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 3.4. Penganggaran
- 3.5. Hubungan RPJMD kabupaten dengan RPJM desa, RKP desa dan APB
desa

BAB IV. PENUTUP

DAFTAR BACAAN

TENTANG PENULIS



“(Tema: 6 (Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan))”

**CAPAIAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS PASCA MDGs
DALAM PERSPEKTIF REGIONAL DAN NASIONAL**

Oleh

Soetji Lestari, Sofa Marwah, Oktafiani Catur Pratiwi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
soetjilestari123@gmail.com

ABSTRAK

Hasil analisis awal menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyumas pada akhir program MDGs tahun 2015 berada pada posisi di bawah capaian angka regional Jawa Tengah dan Nasional. Untuk itu makalah ini bertujuan untuk mengkaji capaian IPG di Kabupaten Banyumas pasca program MDGs, sejauh mana terjadi perubahan posisi baik itu pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kajian didasarkan pada analisis data sekunder yang bersumber dari buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018” yang diterbitkan oleh KPPPA dan BPS. Hasil analisis memperlihatkan bahwa IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs justru mengalami penurunan dari 67,37 (tahun 2015) menjadi 67,32 (tahun 2017). Meskipun angka penurunan tidak terlalu signifikan, namun pada periode yang sama capaian IDG di tingkat provinsi dan nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Rendahnya IDG di Kabupaten Banyumas masih disumbangkan oleh semua komponen indikator IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif, perempuan yang menjadi manajer, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Banyumas 2019 yang menghasilkan kenaikan anggota legislatif perempuan merupakan tantangan tersendiri untuk meningkatkan capaian IDG di Kabupaten Banyumas baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Kata Kunci : *Indeks Pemberdayaan Gender, Ketimpangan Gender*

ABSTRACT

Preliminary analysis results show the Gender Empowerment Index (IDG) in Banyumas Regency at the end of the 2015 MDGs program depending on the position below the Central Java and National figures. For this reason, this paper is intended to examine the achievements of the IPG in Banyumas Regency after the MDGs program, to discuss where there has been a change in position both at the provincial and national levels. The study is based on an analysis of secondary data sourced from the book "Gender-Based Human Development in 2018" published by KPPPA and BPS. The results of the analysis reversed IDG in Banyumas Regency after the MDGs reversed the decline from 67.37 (in 2015) to 67.32 (in 2017). Although the reduction rate is not too significant, in the same period the achievement of IDG at the provincial level and a significant national increase. Low IDG in Banyumas Regency is still contributed by all components of IDG indicators, namely women who sit in the legislative institution, women who become managers, and contribute women in household income. The election of legislative members in the 2019 Banyumas Regency which resulted in an increase in women legislative members is a special

challenge to improve the achievement of IDG in the Banyumas Regency both at the provincial and national levels.

Key words: Gender Empowerment Index, Gender Inequality

PENDAHULUAN

Isu kesenjangan gender dalam pembangunan telah lama menjadi perhatian Dunia, dan juga Pemerintah Indonesia. Pembangunan yang awalnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bergeser. Telah menjadi komitmen dunia (yang diprakarsai oleh badan dunia PBB/UNDP) untuk memperkenalkan konsep pembangunan manusia yang responsif gender melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 1995-an. Konsep ini kemudian dipertegas dengan dideklarasikannya *Millenium Development Goals* (MDGs) dimana salah satu tujuannya adalah mendorong tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015. Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs), namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia (Bappenas, 2011).

Deklarasi Milenium tahun 2000 menegaskan tujuan-tujuan utama pembangunan internasional (*Millenium Development Goals/MDGs*), yaitu:

1. Menaggulangi kemiskinan ekstrim dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar universal
3. Mempromosikan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Membasmi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lain
7. Menjamin kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk kerja sama pembangunan

Program ini telah ditargetkan tercapai pada tahun 2015 dan kemudian pasca MDGs dilanjutkan dengan program SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Hasil kajian yang dilakukan BPS, Bappenas, dan UNDP menunjukkan bahwa kesetaraan gender di suatu daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi partisipasi perempuan, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui hasil analisis Lestari, dkk (2017) mengenai potret pembangunan manusia berbasis gender yang ada (IPG dan IDG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 (sebagai tahun akhir target program MDGs) memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas berada di bawah level regional maupun nasional. Rendahnya IPG Kabupaten Banyumas

disumbangkan oleh komponen tingginya *gender gap* pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan. Pengeluaran perkapita perempuan di bawah angka regional dan nasional, sementara pengeluaran perkapita laki-laki ada di atas angka regional dan nasional, sehingga terjadi *gender gap* yang cukup tinggi. Sementara rendahnya IDG Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh semua komponen IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif (18 persen), perempuan yang menjadi manajer (45,90 persen), dan sumbangan pendapatan rumah tangga (31,29 persen). IDG Kabupaten Banyumas ini juga berada di bawah angka regional dan nasional.

Untuk itu makalah bertujuan untuk mengkaji capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) atau *Gender Empowerment Measure/Index* (GEM) di Kabupaten Banyumas pasca program MDGs (tahun 2017), sejauh mana terjadi perubahan posisi baik itu pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai “Capaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) di Kabupaten Banyumas ini didasarkan pada analisis data sekunder yaitu yang bersumber pada buku *Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2018* yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam buku tersebut berisi data tahun 2017. Tahun 2017 dipilih sebagai bahan analisis karena sebagai tahun pasca pelaksanaan MDGs yang antara lain tujuannya adalah capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk melihat hasil capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyumas digunakan analisis komparasi dengan menggunakan hasil capaian di tingkat provinsi Jawa Tengah dan nasional dengan sumber data yang sama, sehingga memiliki nilai komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam sambutannya pada buku PMBG 2018, Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan nasional meliputi tiga hal yaitu: (1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; (3) Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya dalam Pengarusutamaan Gender sasaran utamanya adalah: 1. meningkatnya IPG (metode baru, menggantikan selisih IPM dan IPG seperti tertulis dalam RPJMN 2015-2019), 2. Menurunnya Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG), dan 3. meningkatnya IDG secara periodik.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak yang menggambarkan kebutuhan pokok manusia. Sejak tahun 2015 penghitungan IPM mengalami perubahan metode. Perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan Indeks

Pembangunan Gender (IPG). Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Penghitungan IPM terpisah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Pemerintah Indonesia menargetkan IDG pada RPJMN 2015-2019 semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis Lestari, dkk (2017) berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan KPPPA dan BPS pada akhir tahun program MDGs (2015), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014-2015 masih berada di bawah angka provinsi (Jawa Tengah) dan angka nasional (Indonesia). Ini artinya juga di bawah rata-rata dunia (tahun 2015 71,05). Namun dua tahun pasca pelaksanaan akhir program MDGs, posisi capaian IPM di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya ketimpangan gender IPM laki-laki dan IPM perempuan yang cukup timpang sehingga menghasilkan **Indeks Pembangunan Gender** yang rendah baik dalam skala regional dan nasional, sebagaimana terlihat dalam tabel 1 di bawah.

Tabel 1. IPM, IPG dan Komponennya di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

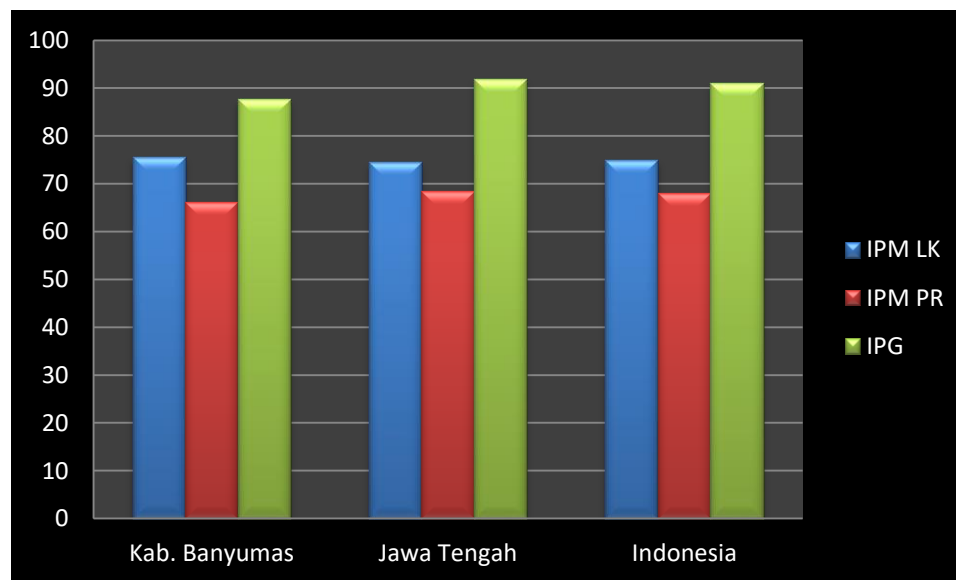
Wilayah	Harapan Hidup		Harapan lama sekolah		Rata-rata lama Sekolah		kapita disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kab. Banyumas	71,39	75,17	12,88	12,63	7,93	7,11	15.499	7.359	75,5	66,15	87,62
Jawa Tengah	72,16	76,02	12,52	12,63	7,79	6,78	14.214	9.207	74,48	68,48	91,94
Indonesia	69,16	73,06	12,78	12,93	8,56	7,65	14.932	8.752	74,85	68,08	90,96

Sumber data: KPPPA dan BPS (2018)

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bagaimana kesenjangan gender IPM laki-laki dan IPM perempuan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada pasca MDGs (2017). Pada IPM laki-laki Kabupaten Banyumas memiliki capaian tertinggi (75,5) dibanding di tingkat Jawa Tengah (74,48) dan nasional (74,85). Sebaliknya pada IPM perempuan Kabupaten Banyumas memiliki capaian IPM terendah (66,15) dibanding IPM perempuan Jawa Tengah (68,48) dan nasional (68,08). Kesenjangan gender IPM laki-laki dan IPM perempuan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada pasca MDGs (2017) tersebut menghasilkan capaian IPG yang rendah (87,62) dengan perbedaan cukup signifikan di level regional (91,94) dan nasional (90,96). Komponen yang menyumbangkan kesenjangan gender pada

capaian IPG adalah “Pendapatan Perkapita yang disesuaikan”. Padahal sebagaimana sudah diungkap di atas hasil kajian yang dilakukan BPS, Bappenas, dan UNDP menunjukkan bahwa kesetaraan gender di suatu daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi partisipasi perempuan, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Perbedaan IPM laki-laki dan IPM perempuan secara lebih lebih jelas terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

IPM dan IPG adalah merupakan ukuran yang menyangkut kebutuhan/kualitas dasar manusia (pendidikan, kesehatan dan ekonomi). Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowering Measurement* adalah merupakan indikator yang lebih maju lagi karena lebih melihat pada pemberdayaan perempuan, yakni dengan cara melihat peranan/ partisipasi dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi Partisipasi Politik menggunakan indikator proporsi (keterwakilan) perempuan dan laki-laki di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD); Dimensi Partipasi Ekonomi dan Pengambilan Keputusan menggunakan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan; Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi menggunakan indikator perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki (KPPPA dan BPS 2012).

Apabila IPM dan IPG menggambarkan kebutuhan pokok, maka IDG merupakan gambaran capaian sebagaimana yang ditargetkan oleh MDGs yakni, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga dapat meningkatkan *bargaining position* perempuan dalam proses pembangunan,

sesuai dengan pendekatan Gender dan Pembangunan. Dalam pendekatan Gender dan Pembangunan, perspektif gender dapat dilihat dari lima tingkatan pemberdayaan yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- Tahap pertama, yaitu tahap kesejahteraan, yakni tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, seperti gizi, persediaan makanan, dan pendapatan
- Tahap kedua, yaitu tahap akses yaitu untuk melihat apakah terdapat kesenjangan gender yang muncul akibat ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dan pelayanan
- Tahap ketiga, yaitu tahap kesadaran kritis. Pada tahap ini harus ditumbuhkan di kalangan laki-laki dan perempuan untuk melihat bahwa apakah ada praktik-praktik diskriminasi gender di antara mereka
- Tahap keempat, yaitu tahap partisipasi yaitu harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan
- Tahap kelima, yaitu tahap kontrol yaitu untuk melihat apakah terdapat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan

Secara kuantitatif capaian pemberdayaan perempuan dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hasil analisis awal oleh Lestari, dkk (2017) menunjukkan bahwa capaian perkembangan IDG di Kabupaten Banyumas dari tahun 2010 sampai tahun 2015 relatif lambat dibanding capaian IDG di tingkat provinsi. Tahun 2010 selisih IDG Kabupaten Banyumas dan provinsi tidak terlalu jauh, yakni 1,39, namun pada tahun 2015 selisih IDG Kabupaten Banyumas dan provinsi meningkat menjadi 6,53. Bahkan pada tahun 2014, IDG Kabupaten Banyumas sempat mengalami penurunan di saat IDG Jawa Tengah justru meningkat tajam. Namun pada tahun 2015 IDG Kabupaten Banyumas meningkat cukup signifikan, sementara kenaikan IDG di tingkat provinsi hanya kecil. Meskipun ada kenaikan IDG yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2014-2015, namun capaian IDG di Kabupaten Banyumas masih jauh di bawah capaian IDG tingkat provinsi. Artinya capaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas belum memuaskan sebagaimana yang ditargetkan oleh MDGs pada tahun 2015. Hal ini terkait dengan komponen masih rendahnya partisipasi politik dan ekonomi perempuan di Kabupaten Banyumas

Sementara data tabel 2 di bawah adalah capaian IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs yang ternyata tidak banyak mengalami perubahan.

Tabel 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Wilayah	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sbg Tenaga Manajer, Profesional, Adm, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
Kab. Banyumas	18,00	43,59	30,35	67,32
Jawa Tengah	24,00	46,97	34,13	75,10
Indonesia	17,32	46,31	36,62	71,74

Sumber data: KPPPA dan BPS (2018)

Apabila hasil kajian sebelumnya memperlihatkan bahwa tujuan MDGs untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015 di Kabupaten Banyumas belum sebagaimana yang diharapkan, pasca MDGs IDG Kabupaten Banyumas justru semakin menurun. Tabel 2 memperlihatkan bahwa IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs justru mengalami penurunan dari 67,37 (tahun 2015) menjadi 67,32 (tahun 2017). Meskipun angka penurunan tidak terlalu signifikan, sementara pada periode yang sama capaian IDG di tingkat provinsi dan nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Rendahnya IDG di Kabupaten Banyumas masih disumbangkan oleh semua komponen indikator IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif, perempuan yang menjadi manajer, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga.. Faktor rendahnya penghasilan perempuan (feminisasi kemiskinan) yang ada memberikan dampak terhadap upaya capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 memberikan harapan baru bagi upaya peningkatan capaian Indeks Pemberdayaan Gender disbanding dengan periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019 dari 45 anggota legislatif Banyumas, hanya ada 18 persen anggota perempuan, masih jauh dari angka 30 persen. Di tingkat nasional juga hanya 17,32 persen. Dalam analisis Hubeis (2010) bahwa situasi politik yang ada masih menempatkan para perempuan politisi dalam situasi diskriminasi politik berbasis gender yang membuat mereka tidak lagi menjadi mitra politik yang dikawal dengan *affirmative action* (quota 30 persen keterwakilan perempuan), melainkan harus berjuang sendiri sebagai layaknya seorang politisi kawakan yang harus berjuang dengan prinsip-prinsip demokratis dan *fairness*. Dengan kondisi ini ketimpangan gender dalam bidang politik akan tetap tinggi.

Pada tahun 2019 ini jumlah anggota legislatif perempuan meningkat 4 persen dibanding pada sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dan 2019

No	Partai	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2015	2019	2015	2019	2015	2019
1.	PDI - P	12	13	4	4	16	17
2.	PKB	4	5	3	3	7	8
3.	Gerindra	5	5	1	2	6	7
4.	Partai Golkar	6	6	0	0	6	6
5.	PKS	4	3	0	1	4	4
6.	PAN	4	3	0	0	4	3
7.	PPP	3	1	0	1	3	2
8.	Nasdem	1	2	0	0	1	2
9.	Demokrat	3	1	1	0	3	1
Banyumas		41	39	9	11	50	50
Persentase		82,0	78,0	18,0	22,0	100%	100%

Sumber: Direkap dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 3 di atas jumlah anggota legislatif mengalami peningkatan dari 18 persen pada pemilu tahun 2014 menjadi 22 persen pada pemilu tahun 2019 atau meningkat 4 persen (penambahan 2 orang). Penambahan suara diperoleh dari Partai Gerindra dan PKS. Dari 9 partai yang memiliki kursi di DPRD, perempuan hanya tersebar dalam 5 partai. Perempuan terbanyak berasal PDI-P (4 kursi dari 11 kursi perempuan). Hal ini dapat dipahami mengingat PDI-P menguasai sekitar 30 persen kursi yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas. Bagaimanapun keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan indikator penting untuk melihat bagaimana perempuan memiliki *bargaining power*, dimana perempuan bisa terlibat dalam keputusan-keputusan politis yang strategis untuk kemaslahatan umat, khususnya menyangkut perbaikan kaum perempuan

KESIMPULAN

Hasil analisis memperlihatkan bahwa IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs justru mengalami penurunan dari 67,37 (tahun 2015) menjadi 67,32 (tahun 2017). Meskipun angka penurunan tidak terlalu signifikan, namun pada periode yang sama capaian IDG di tingkat provinsi dan nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Rendahnya IDG di Kabupaten Banyumas masih disumbangkan oleh semua komponen indikator IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif, perempuan yang menjadi manajer, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Banyumas 2019 yang menghasilkan kenaikan anggota legislatif perempuan merupakan tantangan tersendiri untuk meningkatkan capaian IDG di Kabupaten Banyumas baik di tingkat provinsi maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin; Desta Fauzan A., Warastri Laksmyasri, Ayu Rahmaningtyas. 2015. “Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia” dalam *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2015*, Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2016. *Banyumas Dalam Angka 2016*, Purwokerto.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*, Jakarta.
- Hubeis, Aida Vitayala S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, Jakarta.
- Lestari, Soetji, Sofa Marwah, Oktafiani Catur P., 2017. “Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2015”, *Prosiding dalam Seminar Nasional dan Call Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII” 17-18 November 2017* di Purwokerto
- UNDP. 2016. *Human Development Report 2015 – Work for Human Development*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf diakses pada 2 November 2017 jam 08.02